

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

LAKIP



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	6
2.1. Rencana Kerja Tahun 2025	6
2.2. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian kinerja perencanaan berdasarkan perencanaan RPD 2024-2026.....	16
3.2. Capaian kinerja perencanaan berdasarkan perencanaan Renstra 2025-2029.	33
3.3. Kinerja Anggaran	71
3.4. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	82
3.5. Penghargaan	86
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1. Kesimpulan Capaian Kinerja	88
4.2. Rekomendasi	89
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2025	3
Tabel 2.	Sebaran PPPK Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	3
Tabel 3.	Sebaran PNS dan PPPK Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	4
Tabel 4.	Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025 (RPD 2024-2026)	6
Tabel 5.	Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	9
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 (Perjanjian Kinerja Awal RPD sesuai RPD 2024-2026)	11
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 (Perjanjian Kinerja Renstra 2025-2029)	12
Tabel 8.	Capaian Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja Awal RPD sesuai RPD 2024-2026)	14
Tabel 9.	Capaian Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja Renstra sesuai RPD 2025-2029)	15
Tabel 10.	Capaian Sasaran Startegis Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan	17
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan	18
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Nilai Ekspor Sulawesi Selatan	20
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Produksi Perikanan	22
Tabel 14.	Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2021 – 2025	22
Tabel 15.	Capaian Indikator Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	24
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU Nilai Tukar Usaha Perikanan	25
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU Nilai Tukar Nelayan	26
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinejra Sasaran II IKU Nilai Tukar pembudidaya	28
Tabel 19.	Capaian Indikator Sasaran Strategis III Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan	29

	Perikanan	
Tabel 20.	Capaian Indikator Sasaran Strategis Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	30
Tabel 21.	Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan & Perikanan per komponen pelaku usaha Tahun 2021-2025	31
Tabel 22.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	32
Tabel 23.	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	33
Tabel 24.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Produksi Perikanan	33
Tabel 25.	Realisasi produksi budidaya tahun 2021 – 2025	35
Tabel 26.	Realisasi produksi budidaya per komoditi dibandingkan target nasional	35
Tabel 27.	Realisasi produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota tahun 2021 – 2025	36
Tabel 28.	Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2021 - 2025	38
Tabel 29.	Ketersediaan Benur UPT PBAPL tahun 2021 -2025	40
Tabel 30.	Realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi budidaya tahun 2021 – 2025	41
Tabel 31.	Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Tahun 2019-2025	45
Tabel 32.	Capaian Kinerja indikator sasaran Konsumsi Ikan Tahun 2025	47
Tabel 33.	Realisasi Indikator kinerja Produksi Olahan dan Nilai produksi Olahan	50
Tabel 34.	Jumlah UPI, UPI ber SKP dan SKP terbit tahun 2019-2025	51
Tabel 35.	Realisasi Indikator kinerja Persentase Pengujian Pembinaan Mutu Produk Perikanan	52
Tabel 36.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 6 Nilai Tukar Pembudidaya	53
Tabel 37.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 7 Nilai Tukar Nelayan	55
Tabel 38.	Capaian Indikator Sasaran Strategis III Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	58
Tabel 39.	Capaian Indikator Sasaran Startegis III IKU 5 Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	59

Tabel 40.	Perkembangan Cakupan Pengawasan SDKP Tahun 2020 -2024	61
Tabel 41.	Capaian hasil pengawasan kepatuhan pelaku usaha sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2021-2025	62
Tabel 42.	Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan	63
Tabel 43.	Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan	65
Tabel 44.	Persentase Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola Tahun 2020 – 2024	66
Tabel 45.	Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan	67
Tabel 46.	Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	67
Tabel 47.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68
Tabel 48.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III IKU 7 indikator Nilai SAKIP OPD	69
Tabel 49.	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025	70
Tabel 50.	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025	71
Tabel 51.	Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2025	72
Tabel 52.	Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Nilai PDRB sektor Perikanan dan PDRB Povinsi Sulawesi Selatan	18
Grafik 2.	Realisasi Nilai Produksi Perikanan per triwulan Tahun 2024 - 2025	19
Grafik 3.	Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap nilai ekspor Sulawesi Selatan	21
Grafik 4.	Produksi garam perbulan tahun 2023, 2024 dan triwulan III 2025	23
Grafik 5.	Produksi dan nilai produksi rumput laut Prov Sulawesi Selatan tahun 2021-2025	38
Grafik 6.	Produksi dan nilai produksi udang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2025	40
Grafik 7.	Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021-2025	48
Grafik 8.	Produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2025	50
Grafik 9.	Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya tahun 2021-2025	54
Grafik 10.	Perbandingan Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar pembudidaya Tiap bulan tahun 2025	54
Grafik 11.	Nilai Tukar Nelayan tahun 2021-2024	56
Grafik 12.	Perbandingan Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar nelayan Tiap bulan tahun 2025	57

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai wujud implementasi SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Meskipun data yang ditampilkan pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan data sementara, berhubung masih menunggu Validasi Nasional oleh KKP, namun diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang. Adapun dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun narasinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Februari 2026
KEPALA DINAS

Dr. M. Ilyas, ST, M.Sc
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 197006061996031006

RINGKASAN

Berdasarkan perjanjian kinerja awal yang telah ditetapkan berdasarkan RPD 2020-2024 yaitu terdiri dari Empat Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan penetapan Renstra 2025 – 2029 sehingga perjanjian kinerja (perubahan) terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Realisasi capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kriteria capaian kinerja Sangat Tinggi yaitu : 1) Produksi Perikanan (98,24 %), 2) Konsumsi Ikan (100,14 %), 3) NTN (101,72 %), 4) NTPi (100,33 %), 5) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (96,63 %), 6) Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (100 %) dan 7) Nilai SAKIP perangkat daerah (98,69 %). Pencapaian kinerja tersebut didukung pelaksanaan kinerja anggaran pagu sebesar Rp 86.862.381.251,99 dan terealisasi sebesar Rp 78.957.001.221,50 atau 90,89 % serta realisasi fisik sebesar 96,25 %.

Rekomendasi upaya perbaikan diantaranya : (1) Perlunya penguatan tata kelola perikanan budidaya, tata kelola perikanan tangkap, tata kelola kawasan konservasi, tata kelola pengelolaan ruang laut sesuai kewenangan provinsi untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, (2) Pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak (*pentahelix*) untuk menunjang berbagai program prioritas yang telah ditetapkan, (3) Perlunya pendampingan dan bantuan teknis di lapangan untuk memberikana layanan kepada pelaku usaha, mensosialisasikan terkait transisi kebijakan agar mudah dipahami, dimengerti manfaat dari penerapan kebijakan dan memantau perkembangan dilapangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung pengelolaan perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan (4) Melaksanakan inovasi program unggulan berdasarkan potensi unggulan dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak dan berkelanjutan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun struktur organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

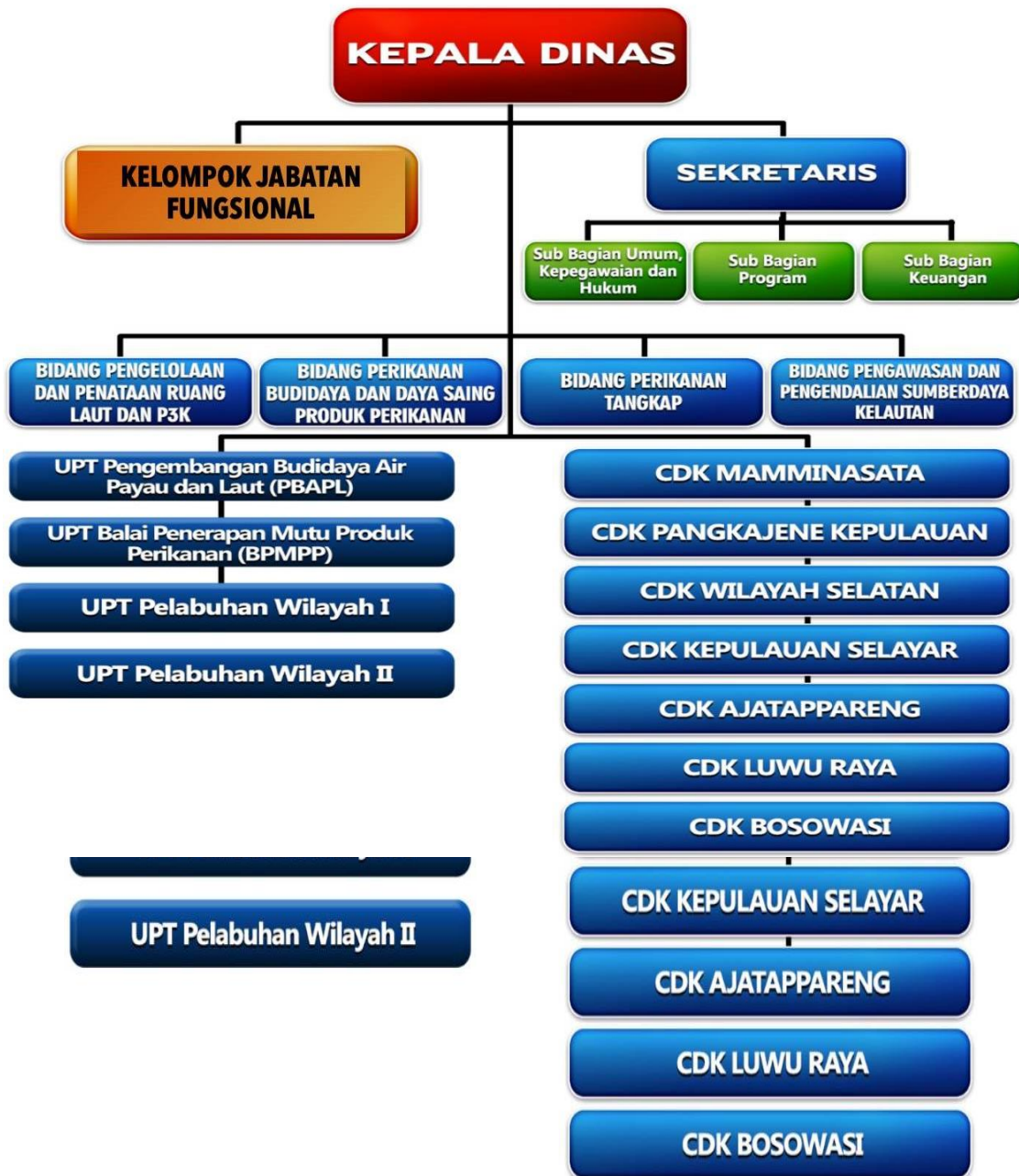
1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang (4 Bidang)
4. Kepala UPTD (4 UPTD)
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (7 CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir bulan Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.
Sebaran PNS Lingkup Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2025
Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	PNS Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2	II	0	1	1	0	1	0	4	0	6	1	7
3	III	10	6	8	3	8	8	31	40	57	57	114
4	IV	18	22	3	4	1	0	0	0	22	26	48
Jumlah PNS		28	29	12	7	11	8	35	40	86	84	170

Tabel 2.
Sebaran PPPK Lingkup Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2025
Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	PPPK Gol. Ruang	Jumlah		Total
		L	W	
1	IX	38	39	77
2	VII	5	5	10
3	V	34	10	44
4	I	8	0	8
Jumlah PPPK		85	54	139

Sebaran PNS dan PPPK lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 3.
Sebaran PNS dan PPPK Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS		Total PNS	Jumlah PPPK		Total PPPK
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	S3	3	2	5	-	-	-
2	S2	23	37	60	1	0	1
3	S1	42	44	86	37	39	76
4	DIII	2	0	2	5	5	10
5	DII	1	0	1	-	-	-
6	SMA	14	1	15	34	10	44
7	SMP	0	0	0	-	-	-
8	SD	1	0	1	8	-	8
<i>Jumlah</i>		<i>86</i>	<i>84</i>	<i>170</i>	<i>85</i>	<i>54</i>	<i>139</i>

1.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan di masa lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang terdapat dalam berbagai dokumen perencanaan strategis di Sulawesi Selatan menjadi elemen penting dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis termasuk isu-isu strategis terkait tata ruang wilayah menjadi dasar untuk menyelaraskan pembangunan dengan potensi dan kapasitas ruang. RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 merumuskan isu-isu strategis jangka panjang yang mencerminkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPD Tahun 2024-2026 memberikan panduan isu-isu prioritas dalam jangka menengah, sedangkan dokumen KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang menjadi dasar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumberdaya alam. Keselarasan antara isu-isu strategis dari berbagai dokumen ini dengan isu-isu nasional menjadi pijakan penting untuk

merumuskan kebijakan pembangunan yang holistik dan terintegrasi. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut maka berikut beberapa isu strategis Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2024 – 2029 antara lain:

1. Peningkatan produktivitas mendukung swasembada pangan dan berbasis ekonomi biru
2. Hilirasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing global.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan
4. Perluasan kawasan konservasi serta penguatan pengawasan terintegrasi untuk mencegah penurunan daya dukung lingkungan dan menghadapi ancaman perubahan iklim.
5. Penguatan kualitas SDM yang berdaya saing menghadapi era transformasi digital

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa RPD 2020-2024 dan penetapan Renstra dan RPJMD 2025–2029, maka terdapat beberapa penyesuaian. Berdasarkan surat Deputi Kementerian PAN dan RB nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 disampaikan bahwa laporan kinerja disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mengacu pada RPD 2024-2026 yang digunakan selama masa transisi dan Perjanjian Kinerja Renstra 2025-2029.

Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2025 berdasarkan RPD 2024-2026 yaitu :

Tabel 4
Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025
(RPD 2024-2026)

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
1.	Sasaran : Meningkatnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 – 88 (A)	Kepala Dinas
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah (%)	87,11	Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK
		Rata-rata nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%)	100,92	
		Persentase temuan LHP Selesai Ditindaklanjuti (%)	83,16	
2.	Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	10,82	Kepala Dinas
	Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor	22,94		

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
	perikanan yang berkelanjutan	Sulawesi Selatan (%)		
		Produksi Perikanan (ton)	4.875.744,5	
		Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	73,93	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	11.960,23	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Produksi perikanan tangkap (ton)	451.818,7	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	89,47	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M)	22.187,16	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III)
		Produksi perikanan budidaya (ton)	4.417.925,7	Kepala Bidang Perikanan Budidaya , Kepala UPT PBAPL (Eselon III)
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	90	Kepala UPT PBAPL (Eselon III)
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Keci	Produksi garam rakyat (ton)	6.000	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir (eselon III)
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	78,44	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir , Kepala CDK (eselon III)
d.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp. M)	411,54	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing, Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan ikan konsumsi (ton)	6.723,44	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing, Kepala UPT BPMPP (Eselon III)

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
		Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)	100	Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
3.	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	111,95	Kepala Dinas
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	111,01	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,63	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	31,23	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
4.	Sasaran: Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	99,7	Kepala Dinas
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	60,75	
		Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola (%)	96,78	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Perluasan kawasan konservasi perairan dikelola secara berkelanjutan (Ha)	822.559,69	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir, Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	100	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir, Kepala CDK (Eselon III)

Sementara itu perencanaan kinerja Renstra tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
1.	Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	Kepala Dinas
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK
2.	Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	5.450.079,6	Kepala Dinas
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115,3	
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	109,83	
		Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	73,50	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	521.583,60	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	4.928.496	Kepala Bidang Perikanan Budidaya , Kepala UPT PBAPL (Eselon III)
c.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai ekonomi hasil perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan) (Rp. T)	32,03	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing, Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.638,70	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing,

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
				Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Persentase hasil kelautan pengujian mutu produk perikanan (%)	80	Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
3.	Sasaran: Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan perundang- undangan yang berlaku (%)	82	Kepala Dinas
		Luas Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan dan efektif dikelola (%)	829.561,63	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Persentase luas kawasan pesisir dan konservasi dikelola secara berkelanjutan (Ha)	59,44	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir, Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	100	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir, Kepala CDK (Eselon III)

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 yang merupakan komitmen pimpinan, merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025
(Perjanjian Kinerja Awal sesuai RPD 2024 – 2026)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1.	Nilai sakiip perangkat daerah (%)	86 - 90 (A)
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2.	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	10,82
	3.	Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sul Sel (%)	22,94
	4.	Produksi perikanan (ton)	4.875.744,5
	5.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	73,93
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	6.	Nilai tukar usaha perikanan (NTUP)	111,95
	7.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,63
	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	111,01
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	9.	Kepatuhan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan (%)	99,7
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	60,75
	11.	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	96,78

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	37.927.848.409
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.602.691.226
3. Pengelolaan perikanan tangkap	46.271.692.582
4. Prngelolaan perikanan budidaya	2.287.714.200
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan	2.509.931.990
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	767.730.500

Tabel 7.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025
(Perjanjian Kinerja penyesuaian Renstra 2025 – 2029)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1.	Nilai saki perangkat daerah (%)	88
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	2.	Jumlah produksi perikanan (ton)	5.450.079,6
	3.	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	73,50
	4.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	109,83
	5.	Nilai tukar nelayan (NTN)	115,3
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	6.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan (%)	82
	7.	Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)	829.561,63

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	36.061.806.950,99
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.403.256.800,00
3. Penegelolaan perikanan tangkap	23.032.785.775,00
4. Prngelolaan perikanan budidaya	9.841.571.459,00
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan	1.851.255.867,00
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	671.704.400,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
≤ 50 (Sangat Rendah / SR)
$50.1 \leq 65$ (Rendah / R)
$65.1 \leq 75$ (Sedang / S)
$75.1 \leq 90$ (Tinggi / T)
$90.1 \geq$ (Sangat tinggi / ST)

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan

pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{ capaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa tahun 2025 merupakan **masa transisi** maka akan **dijelaskan capaian kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan**. Prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 8.
Capaian Perjanjian Kinerja
(Perjanjian Kinerja Awal sesuai RPD 2024 – 2026)
Sampai dengan Triwulan III tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Nilai sakin perangkat daerah (%)	86 -88 (A)	Pengukuran Tahunan	-
II. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	10,82	8,40	77,63
	3. Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel (%)	22,94	20,84	90,85

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	4.	Produksi perikanan (ton)	4.875.744,5	4.020.896,72	82,47
	5.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	73,93	-	-
III. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	6.	Nilai tukar usaha perikanan (NTUP)	111,95	115,73	103,38
	7.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,01	116,90	105,30
	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	111,63	109,38	97,98
IV. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	9.	Kepatuhan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan (%)	99,7	41,77	41,89
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	60,75	Pengukuran Tahunan	-
	11.	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	96,78	Pengukuran Tahunan	-

Tabel 9.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Perjanjian Kinerja penyesuaian Renstra 2025 – 2029)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Nilai saki perangkat daerah (%)*	88	86,85*	98,69
II. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2.	Jumlah Produksi perikanan (ton)*	5.450.079,6	5.354.331,3	98,24
	3.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)*	73,50	73,60	100,14
	4.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	109,83	110,19	100,32
	5.	Nilai tukar nelayan (NTN)	115,3	117,28	101,72

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	6.	Kepatuhan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan (%)	82	79,24	96,63
	7.	Luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (Ha)	829.561,69	829.561,69	100%

Keterangan : data sementara

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian kinerja perencanaan berdasarkan perencanaan 2024-2026

Masa transisi perencanaan 2024-2026 akan di evaluasi sampai dengan kondisi triwulan III sejalan dengan ditetapkannya Renstra 2024-2029 tanggal 26 september 2025. Berikut penjelasan masing-masing capaian kinerja :

SASARAN I : Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Terdapat 4 (empat) indikator keberhasilan capaian sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10.
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Trw III	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)	10,5	8,4	74,29
	Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel (%)	22,55	20,84	80,84
	Produksi perikanan (ton)	4.779.259,3	4.020.896,72	101,97
	Konsumsi Ikan	72,48	Pengukuran tahunan	-

IK-1, Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

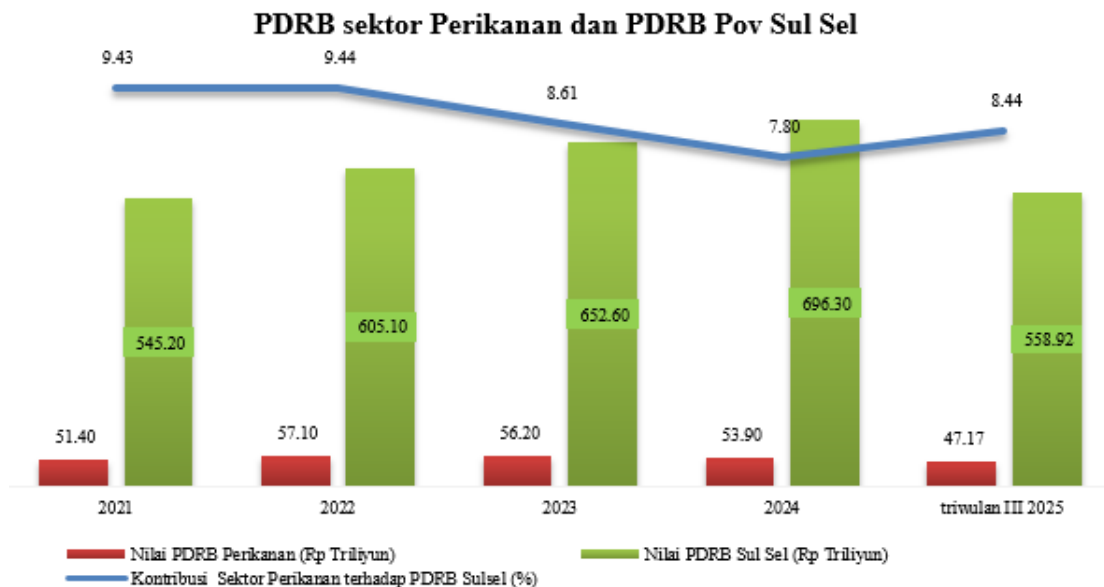
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan di suatu daerah/wilayah. PDRB atau pendapatan regional dibedakan atas dua bentuk yaitu harga berlaku dan harga konstan yaitu : 1) Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflansi dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku, 2) Pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas harga konstan, artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu yang disebut tahun dasar. Data kontribusi PDRB perikanan menggunakan harga belaku dengan tahun dasar tahun 2010 yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah :

$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

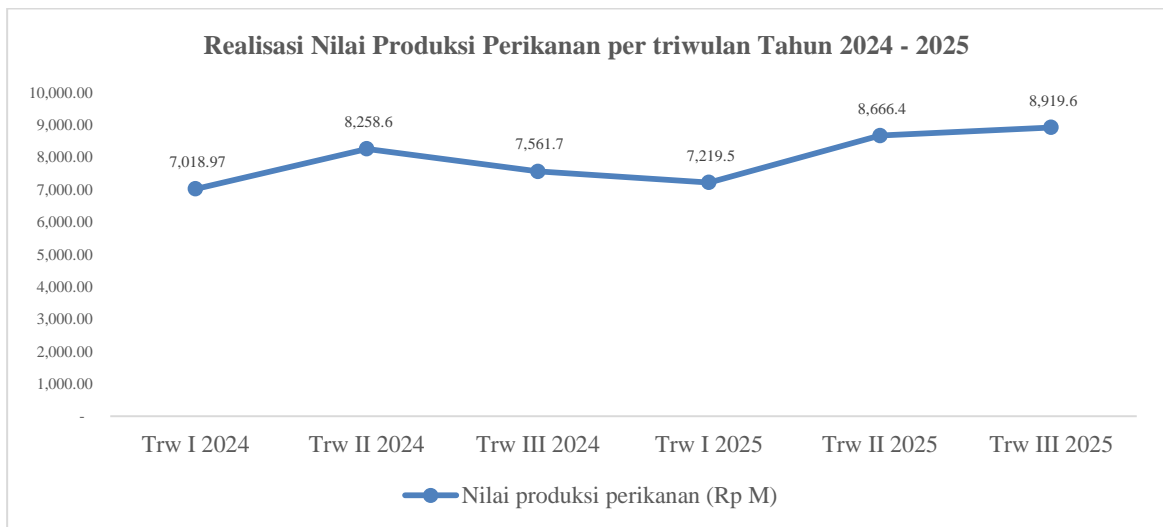
Tabel 11.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Triwulan III Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	9.43	9.44	8,61	7.80	8,40	10,82	77,63	11,14	74,07

Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan triwulan III tahun 2025 mencapai target sebesar 77,63 %. Nilai PDRB perikanan sampai dengan triwulan III sebesar 8,40 % dengan nilai PDRB perikanan sebesar Rp 47.170,53 milyar lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2024 sebesar 7,5 % dengan nilai PDRB perikanan Rp 41.702,59 (PDRB atas harga berlaku).



Faktor pendorong peningkatan Nilai PDRB perikanan adalah peningkatan nilai produksi perikanan sampai dengan triwulan III sebesar Rp 25.805,52 milyar naik 8.6 % dibandingkan tahun 2024 sebesar yaitu Rp 22.839,28 milyar. Perkembangan nilai produksi perikanan per triwulan tahun 2024 – 2025 sebagaimana grafik berikut. Sektor yang mempengaruhi peningkatan nilai produksi perikanan yaitu nilai produksi budidaya sebesar 17,73 %.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai PDRB perikanan adalah meningkatkan produktivitas (volume dan nilai) dan daya saing melalui inovasi pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk perikanan kelautan lainnya.

IK-2, Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Nilai Eskpor Sulawesi Selatan

Indikator kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulawesi Selatan untuk melihat peran sektor perikanan terhadap pemasukan atau nilai uang yang diperoleh dari penjualan produk kelautan dan perikanan ke luar negeri. Nilai ekspor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Rumus penghitungan kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulawesi Selatan adalah :

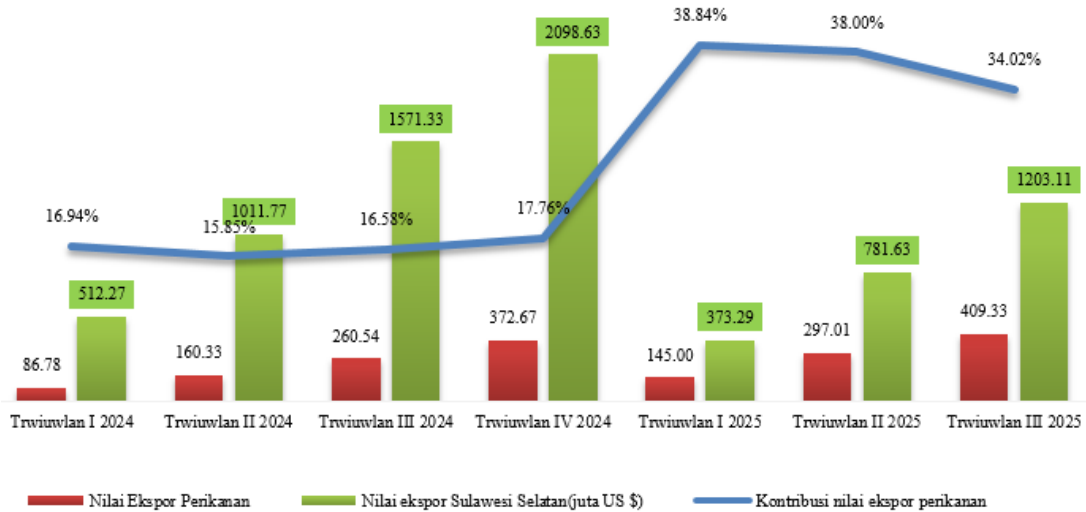
$$\text{kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel} = \frac{\text{Nilai Ekspor perikanan}}{\text{Nilai Ekspor Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Tabel 12.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Nilai Ekspor Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Triwulan III Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulawesi Selatan (%)	27,65	25,88	18,79	18,27	20,84	22,94	90,85	23,34	89,29

Kontribusi Nilai ekspor perikanan sampai dengan triwulan III 2025 masih lebih baik apabila dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 15,85 %. Berdasarkan hasil analisa data, hal ini dipengaruhi karena terjadi penurunan nilai ekspor Sulawesi Selatan sebesar 30,61 % yaitu tahun 2024 sebesar 1.571,73 juta US\$ tahun 2024 turun menjadi 1.203,11 juta US\$ tahun 2025. Sementara itu nilai ekspor perikanan mengalami penurunan namun lebih kecil dibandingkan penurunan nilai ekspor Sulsel yakni sebesar 3,91 % dimana tahun 2025 terealisasi 250,73 juta US\$ lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yaitu 260,54 juta US\$.

Kontribusi Nilai Ekspor perikanan terhadap nilai ekspor Sulawesi Selatan



Upaya yang dilakukan adalah Pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) bertujuan memastikan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP). Pendampingan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi kelompok memahami keamanan pangan, memperluas akses pasar dan memenuhi persyaratan dokumen

IK-3, Produksi Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan produksi garam. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut) serta produksi garam dari kabupaten/kota penghasil garam, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Prod.Kab/Kota I} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

Tabel 13.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Triwulan III Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	4.500.393,56	4.536.058,18	4.735.254,38	4.873.606,35	4.020.896,72	4.875.744,5	82,47	4.974.039,4	80,84

Produksi perikanan sampai dengan triwulan III tahun 2025 mencapai target sebesar 82,47 % dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 triwulan III sebesar 3.914.936.57 ton. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 12,77 % yaitu terdiri dari sektor produksi Perikanan budidaya didukung dari budidaya laut dengan komoditi rumput laut dengan angka kenaikan sebesar 9,2 % serta budidaya tambak dengan angka kenaikan sebesar 19,4 %.

Tabel 14.
Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	Trwiwulan III 2025	Target 2025	Capaian (%)
Produksi perikanan budiaya (ton)	4.081.480,5	4.095.934,7	4.115.586,5	4.314.231,48	3.635.836,16	4.417.925,7	82,30
produksi perikanan tangkap (ton)	417.410,7	436.735,7	504.709,0	511.356,4	371.666,17	451.818,70	82,26
Produksi Garam (ton)	1.283,15	3.387,66	114.959,88	48.018,47	13.394,39	6.000	223,24

a. Produksi Perikanan Budidaya

Data sementara Produksi perikanan budidaya triwulan III 2025 mencapai target 82,30 % dan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 3,224,209.02. Hal ini dipengaruhi peningkatan produksi budidaya khususnya komoditi rumput laut, ikan bandeng dan ikan air tawar.

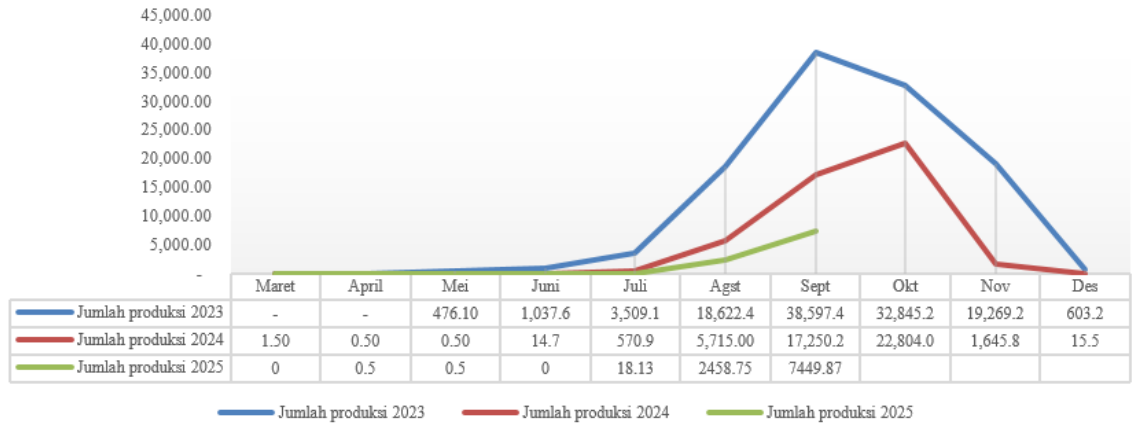
b. Produksi Perikanan tangkap

Data sementara Produksi tangkap triwulan III 2025 mencapai target 82,26 % dan lebih rendah dibandingkan tahun 2024 triwulan III dengan angka sebesar 381,616.64 ton. Hal ini dipengaruhi penurunan produksi penangkapan di perairan laut sebesar 341,288.9 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 348,344,9 ton dan penurunan di produksi tangkap PUD sebesar 33,271.7 ton tahun 2024 menjadi 30,377,3 ton tahun 2025.

c. Produksi garam

Data sementara Produksi garam sampai triwulan III 2025 mencapai target 223,24 % namun lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan III 2024 sebesar 23.553,36 ton. Berdasarkan grafik produksi garam dibawah terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024. Faktor cuaca merupakan kendala utama dalam upaya peningkatan produksi

Produksi garam bulan Maret - Desember tahun 2023, tahun 2024 dan triwulan III 2025



IK-4, Konsumsi Ikan

Realisasi Konsumsi ikan sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum tersedia karena pengukuran indikator tahunan atau dilaksanakan di akhir tahun.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

Tabel 15.
Capaian Indikator Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	111,95	115,73	100,06
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,01	116,90	101,32
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,63	109,38	97,98

IK-1, Nilai Tukar Usaha Perikanan

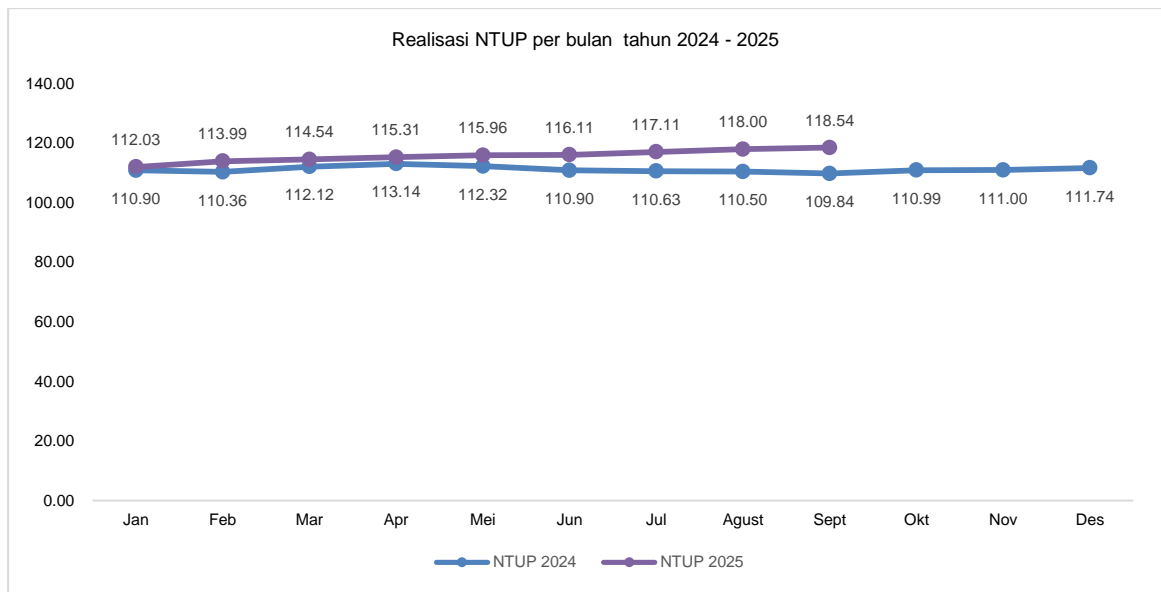
Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima Usaha Perikanan (*It*) terhadap indeks harga yang dibayar Usaha Perikanan (*Ib*). Nilai Tukar Usaha Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan melihat tingkat kemampuan/daya beli. Data NTUP bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$NTUP = \frac{\text{Indeks yang diterima pelaku usaha perikanan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar pelaku usaha perikanan (Ib)}}$$

Tabel 16.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Tukar Usaha Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Triwulan III Tahun 2025			akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	104.04	109.35	112.02	111.20	115,73	111,95	103,38	112.36	103,0

Realisasi Nilai tukar usaha perikanan (NTUP) mencapai target 103,38 %, Nilai Tukar pelaku usaha perikanan triwulan III 2025 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 triwulan III sebesar 111.19. Hal ini disebabkan indeks yang diterima pelaku usaha perikanan mengalami peningkatan yaitu 134.76 tahun 2025 dibandingkan 2024 sebesar 127,97



Dari grafik diatas menunjukkan NTUP 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 karena dipengaruhi indeks yang diterima (it) sampai dengan triwulan III tahun 2025 pelaku usaha perikanan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan kenaikan harga jual produk. Namun demikian indeks yang dibayar (ib) atau yang dikeluarkan pelaku usaha perikanan mengalami peningkatan akibat peningkatan biaya produksi maupun konsumsi. NTUP diatas 100 menunjukkan kenaikan harga rata-rata yang diterima pelaku usaha lebih besar yang dibayarkan atau usaha perikanan memberikan keuntungan.

IK-6, Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Nilai Tukar Nelayan atau NTN

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dengan melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Data NTN bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

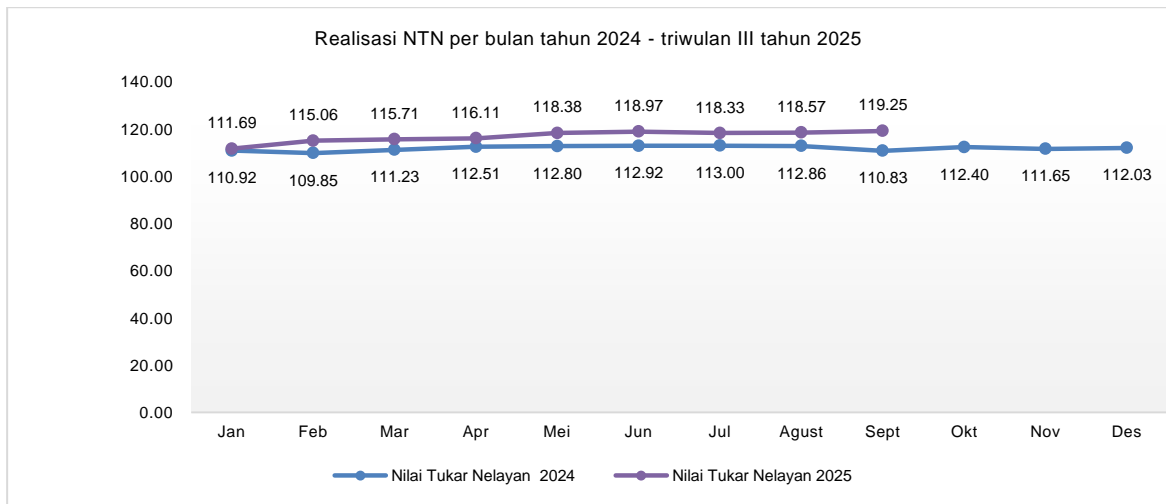
$$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (Ib)}}$$

Tabel 17.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 7 Nilai Tukar Nelayan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Triwulan III Tahun 2025			Target akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2024	Realisasi	Target	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,64	107,43	109,29	111,92	116,90	111,01	105,3	111,56	104,78

Realisasi Nilai tukar nelayan sampai dengan triwulan III tahun 2025 terealisasi sebesar 116.90, dimana mencapai target sebesar 105.3 % dengan peningkatan sebesar 4,48 % apabila dibandingkan triwulan III tahun 2024 sebesar 111.88. Peningkatan NTN menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan nelayan. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap.

NTN menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Pada kurun waktu bulan januari - Desember tahun 2025, angka NTN berada diatas 100 artinya yang diterima nelayan lebih besar dengan yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan layak dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan nelayan adalah alat bantu tangkap, modernisasi armada dan alat tangkap untuk meningkatkan produktivitas, alat tangkap rumpon untuk mengefisiensikan biaya operasional, fasilitasi ke Kementerian terkait pembangunan SPDN di pelabuhan untuk mempermudah akses nelayan terhadap kebutuhan BBM.

IK-7, Nilai Tukar Pembudidaya

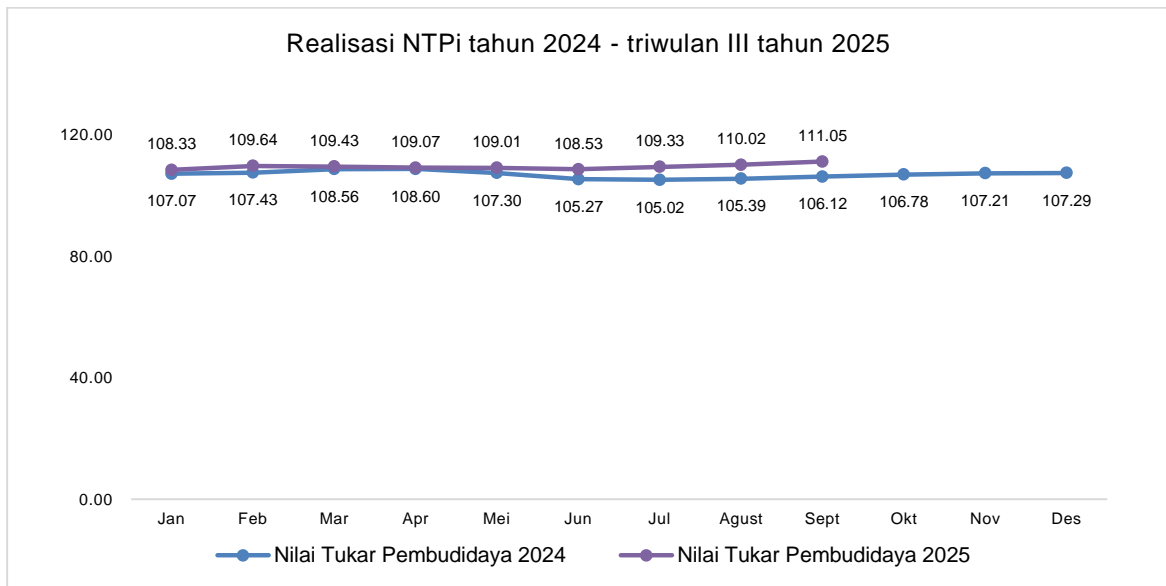
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari dan biaya usaha budidaya. Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi yang lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi. Data NTPi bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tukar Pembudidaya} = \frac{\text{Indeks yang diterima pembudidaya (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar pembudidaya (Ib)}}$$

Tabel 18.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 6 Nilai Tukar Pembudidaya

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Realisasi Trw III Tahun 2025			Target akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101.90	109.98	111.35	106,84	109,38	111.63	97,98	112.19	97,49

Realisasi Nilai tukar pembudidaya sampai dengan triwulan III tahun 2025 mencapai target 97,98 % dan naik 2,46 % dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2024.



Nilai tukar pembudidaya lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi. Peningkatan NTPi menunjukkan peningkatan pendapatan pembudidaya dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai produksi perikanan budidaya. Upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga produktivitas pembudidaya serta bantuan sarana prasarana untuk membantu biaya produksi seperti penyediaan benih ikan agar usaha pembudidaya dapat terus berlangsung.

SASARAN 3 : Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Keberhasilan capaian sasaran strategis III diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola, (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, (3) Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tabel 19.
Capaian Indikator Sasaran Strategis III Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola (%)	96,78	Pengukuran data tahunan	-
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)*	59,56	Pengukuran data tahunan	-
	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	99,7	41,77	41,90

IK-8, Cakupan Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola

Realisasi cakupan luasan kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum tersedia karena pengukuran indikator tahunan atau dilaksanakan di akhir tahun.

IK-9, Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman

Realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum tersedia karena pengukuran indikator tahunan atau dilaksanakan di akhir tahun.

IK-10, Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para

pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

$$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \right) \cdot 100\%$$

n

Keterangan:
 x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
 ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh
 s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa
 i: jenis komponen pelaku usaha KP
 n: jumlah komponen pelaku usaha KP

Tabel 20.
 Capaian Indikator Sasaran Strategis Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Triwulan III Tahun 2025			Akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian %	Target	Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	69,18	94,01	56,35	48,97	41,77	99,70	41,89	100	41,77

Realisasi Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan triwulan III terealisasi 41,77 % atau mencapai 41,89 % terhadap target yang ditetapkan. Rendahnya tingkat kepatuhan disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut disebabkan karena melakukan aktivitas tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL),

Komponen pelaku usaha yang diperiksa sampai dengan trwiulan III sebanyak 2 jenis usaha yaitu pelaku usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil dan pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya kelautan kewenangan provinsi. Pelaku usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil oleh unit kerja Cabang Dinas Kelautan sebanyak 589 pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 492 pelaku usaha dengan

tingkat kepatuhan 83,53 %. Pelaku usaha tidak patuh disebabkan belum Memiliki Izin SIUP dan SIPI (CDK Luwu Raya), Belum Memiliki Izin SIUP dan SIPI (CDK Bosowasi), tidak membawa TDKP (CDK Ajatappareng), Tidak memiliki dokumen SLO dan SIB (CDK wilayah Selatan).. Hasil pengawasan kepatuhan pelaku usaha sebagaimana tabel berikut :

Tabel 21.
Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan & Perikanan per komponen pelaku usaha Tahun 2021-2025

No	Komponen Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2021	2022	2023	2024	Trw III 2025	2021	2022	2023	2024	Trw III 2025
1	Usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	357	403	554	713	829	63,87	81,14	77,98	72,66	83,53
2	Usaha Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	8	7	13	-	-	100	57,14	46,15	-
3	Usaha Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	2	2	3	-	-	100	50,0	0	-
4	Usaha Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	5	3	4	-	-	100	33,33	75,0	-
5	Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	9	7	12	-	-	88,89	100	66,67	-
6	Usaha Pemanfaat ruang laut/pemanfaat ruang laut sumberdaya kelautan	-	-	5	3	2	-	-	20	33,33	0
Total pelaku usaha yang diperiksa ; Persentase kepatuhan		357	427	578	748	844	63,87	94,06	56,40	48,97	41,77

SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat satu indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu nilai SAKIP OPD.

Tabel 22.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86 – 88 (A)	Pengukuran tahunan	-

IK-11, Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi Nilai SAKIP perangkat daerah sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum tersedia karena pengukuran indikator tahunan atau dilaksanakan di akhir tahun.

3.2. Capaian kinerja perencanaan berdasarkan perencanaan 2025 – 2029

Berdasarkan penetapan Renstra 2024-2029 tanggal 26 september 2025 maka dilakukan analisis capaian kinerja sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :

SASARAN I : Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan

Terdapat 4 (empat) indikator keberhasilan capaian sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Jumlah Produksi perikanan (ton)	5.450.079,6	5.354.331,3	98,24 %
	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	73,50	73,60	100,14 %
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	109,83	110,19	100,32 %
	Nilai tukar nelayan (NTN)	115,3	117,28	101,72
Rata-rata capaian sasaran				100,11

IK-1, Jumlah produksi perikanan

Tabel 24.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I IKU Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2025-2030)	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	4.498.891,2	4.532.670,4	4.620.295,5	4.825.587,88	5.354.331,44	5.450.079,6	98,24 %	6.844.237,7	77,78 %

Produksi perikanan mencapai target sebesar 98,24 % dan mengalami kenaikan sebesar 10,96 % dibandingkan tahun 2024. Pada kurun waktu 2021-2025 pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,94 %. Faktor pendorong peningkatan produksi perikanan didukung dari perikanan budidaya yang meningkat sebesar 12,23 % lebih tinggi dari proyeksi perencanaan sebesar 5 %. Produksi Perikanan budidaya didukung budidaya laut (rumput laut) meningkat sebesar 10,20 %, budidaya tambak meningkat sebesar 16,02 %, budidaya kolam meningkat sebesar 14,39 % dan budidaya sawah (minapadi) meningkat sebesar 9,61 %. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah perlambatan peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 0,21 % lebih rendah dari proyeksi perencanaan sebesar 2 %. Perlambatan

peningkatan produksi perikanan tangkap disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain : cuaca ekstrem (terutama angin Barat) sehingga nelayan tidak melaut, transisi regulasi seperti implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, ketersediaan BBM bersubsidi yang di akses melalui aplikasi online XTAR BPH migas, kebijakan penggunaan alat tambahan berupa VMS bagi kapal nelayan ukuran 30 GT keatas.

Upaya yang telah dilakukan adalah Sosialisasi dan Uji Coba Implementasi Penerbitan Surat Rekomendasi melalui aplikasi XSTAR dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM subsidi yang melibatkan seluruh Dinas Perikanan Kab/Kota, Kepala UPT Pelabuhan dan Satuan Pelayanan Pelabuhan perikanan.

Penjelasan dua faktor yang mempengaruhi produksi perikanan yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap sebagai berikut :

a. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya mencapai target sebesar 98,24 % dan mengalami kenaikan sebesar 12,23 % apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Persentase peningkatan rata-rata produksi pada kurun waktu 2021-2025 sebesar 6,95 %.

Tabel 25.
Realisasi produksi budidaya tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2025/Target nasional	Capaian (%)
Produksi perikanan budiaya (ton)	4.081.480,5	4.095.934,7	4.115.586,5	4.314.231,48	4.841.881,62	4.928.496	98,24

Jika dibandingkan dengan **target nasional** maka capaian produksi perikanan budidaya perkomoditas disajikan pada tabel 26 berikut.

Tabel 26.
Realisasi produksi budidaya per komoditi dibandingkan target nasional

No	Komoditas	Tahun 2025 (target Nasional)	Realisasi tahun 2025*	Realisasi tahun 2024	Capaian terhadap target 2025 (%)	Kenaikan (+)/penurunan produksi (-)
	NASIONAL	4.928.496,0	4.841.881,62	4.314.231,1	98,2	12,2
1.	Udang	88.945	71.201,63	68.577,5	80,05	3,8
2.	Rumput laut	4.591.966	4.509.479,42	4.018.692,10	98,20	12,2
3.	Bandeng	210.879	224.962,32	193.873,08	106,68	16,0
4.	Kerapu	97	21,86	46,82	22,54	-53,3
5.	Kakap	91	67,41	62,95	74,08	7,1
6.	Kekerangan	-	-	-	-	-
7.	Ikan mas	12.257	10.171,07	9.777,47	82,98	4,0
8.	Nila	13.388	14.727,22	13.815,2	110	6,6
9.	Lele	3.634	3.589,25	3.452,58	98,77	4,0
10.	Patin	4	5,98	3,84	149,5	55,7
11.	Gurame	33	54,43	39,49	164	37,8
12.	Kepiting	2.973	3.868,82	2.865,22	130,13	35,0
13.	Lobster	32	15,23	14,23	47,60	7,0
14.	Lainnya	4.197	3.716,98	3.010,6	88,56	23,5

Produksi perikanan budidaya didukung dari sektor budidaya laut dengan jumlah produksi sebesar 3.081.688,3 ton (persentase kenaikan sebesar 10,20 %), budidaya tambak sebesar 1.733.127,7 ton (persentase kenaikan 16,02 %), khususnya produksi

budidaya udang sebesar 71.201,6 ton (persentase kenaikan sebesar 3,83 %) serta produksi budidaya air tawar sebesar 19.917 ton (persentase kenaikan sebesar 14,39 %). Pencapaian volume produksi perikanan budidaya didukung oleh kegiatan bantuan bibit, sarana prasarana budidaya, serta pembinaan dan pendampingan teknis secara rutin (Tenaga pendamping Budidaya) untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, pengujian kesehatan ikan dan lingkungan dan pendampingan CBIB.

Tabel 27.

Realisasi produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota tahun 2021 - 2025

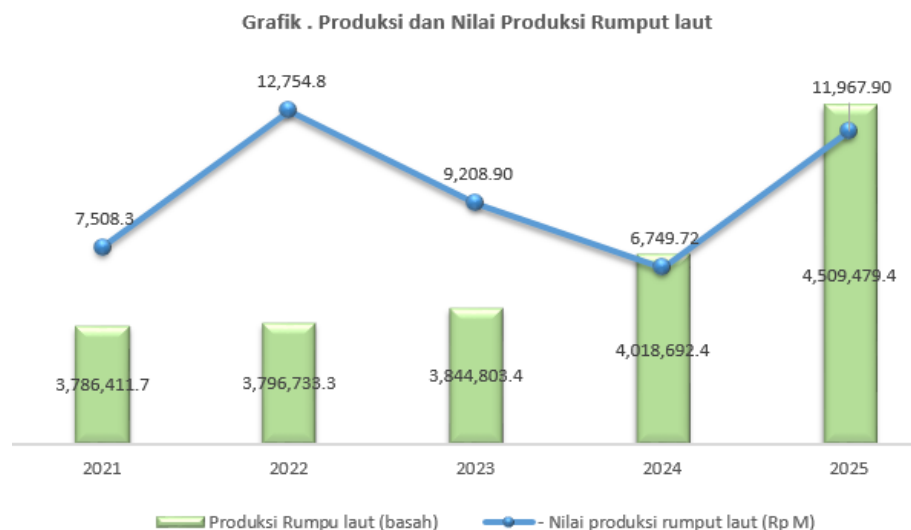
No	Kabupaten	Tahun				
		2025	2024	2023	2022	2021
1	Luwu	664.926,2	652.012,3	647.807,6	641.850,7	627,586.9
2	Luwu Utara	266.786,4	257.767,4	249.050,6	240,762.5	232,620.3
3	Wajo	524.750,3	519.186,5	514.297,4	509,656.9	505,573.4
4	Bone	600.529,6	560.874,2	522.110,9	486,732.1	450,181.0
5	Sinjai	53.591,7	52.098,7	47.208,0	43,836.4	48,174.3
6	Bulukumba	230.688,8	221.538,8	214.799,0	195,758	228,920.0
7	Selayar	484,7	508,0	469,4	543.4	522.8
8	Bantaeng	96.615,3	88.851,8	90.142,9	89,375.3	86,575.3
9	Jenepono	283.930,6	272.014,2	246.403,8	257,230.9	257,604.7
10	Takalar	643.967,9	622.997,9	604.092,3	596,374.7	590,272.0
11	Makassar	1.559,1	1.519,6	1.528,4	1,928.9	1,506.7
12	Maros	31.530,2	30.710,2	29.864,9	28,404.0	27,000.7
13	Pangkep	580.833,3	418.039,1	311.560,7	427,456.3	473,025.4
14	Barru	6.794,8	6.537,6	6.469,2	6,450.1	6,301.1
15	Pare Pare	103,5	91,5	66,8	62.1	40.9
16	Pinrang	69.837,6	69.835,6	69.882,2	67,357.0	64,553.1
17	Gowa	1.191,3	1.190,4	1.116,6	975.4	973.6
18	Luwu Timur	590.656,6	377.110,8	378.996,7	318,944.6	315,590.1
19	Palopo	186.915,1	151.807,1	174.735,9	176,078.6	158,518.8
20	Sidrap	1.497,9	1.488,5	1.216,4	1,488,3	1,350.9

No	Kabupaten	Tahun				
		2025	2024	2023	2022	2021
21	Enrekang	1.758,5	1.126,7	998	1,848.1	1,836.0
22	Soppeng	452,1	445,7	373,4	444.1	436.6
23	Tana Toraja	910,3	877,1	796,4	750.3	692.0
24	Toraja Utara	1.570	1.598,0	1.599,6	1,626.0	1,624.00
Total		4.841.881,6	4.310.234,0	4.115.586,5	4.115.586,5	4.081.480,50

Analisis capaian produksi perikanan budidaya perjenis komoditas dijelaskan sebagai berikut :

Rumput Laut

Produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berkisar 93 %. Capaian produksi rumput laut tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,2 % dibandingkan tahun 2024. Selama kurun waktu 2021 - 2025 produksi budidaya rumput laut terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,08 %. Kenaikan produksi rumput laut dipengaruhi harga rumput laut kering yang mengalami kenaikan yakni berkisar antara Rp 16.437 untuk jenis *E. cottoni*



Salah satu kunci keberhasilan adalah pendampingan lapangan oleh Tim Pendamping kabupaten /kota dimulai dari identifikasi kelompok penerima, proses produksi hingga pasca panen dan pelaporan.

Tabel 28.
Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2021 -2025

NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT				
		Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Luwu	649.799,5	636.144,4	632.932,7	627.984,2	614.258,4
2	Luwu Utara	253.692,6	245.114,7	236.825,3	228.950,1	221.207,8
3	Wajo	527.400,6	490.910,8	486.990,9	483.088,6	479.632,2
4	Bone	499.356,0	435.739,0	416.464,0	366.491,0	337.592,2
5	Sinjai	53.507,0	51.901,0	46.969,7	43.400,5	47.823,8
6	Bulukumba	224.083,1	215.341,9	208.818,2	189.854,1	221.980,9
7	Selayar	341,6	349,4	315,6	381,4	359,1
8	Bantaeng	96.454	88.686,3	89.955,9	89.164,7	86.313
9	Jeneponto	280.215,9	268.312,4	241.609,6	252.795,5	253.389,9
10	Takalar	640.903,5	619.864,6	601.553,2	593.395,5	587.061
11	Maros	17.428,6	16.581,0	15.827,0	14.150,0	12.870
12	Pangkep	558.400	394.900	295.865,0	407.330	450.011
13	Barru	1.362	1.197,7	1.206,0	949,9	667,7
14	Pare-pare	13,5	26,4	9,6	7,9	-
14	Pinrang	42.182,5	40.549,3	36.170,7	23.641,4	19.399,1
15	Gowa	-	-	-	-	20
15	Luwu Timur	479.075,9	357.881,8	359.531,4	299.808,5	296.267,1
16	Palopo	186.317	151.194,2	173.858,4	175.340,0	157.558,4

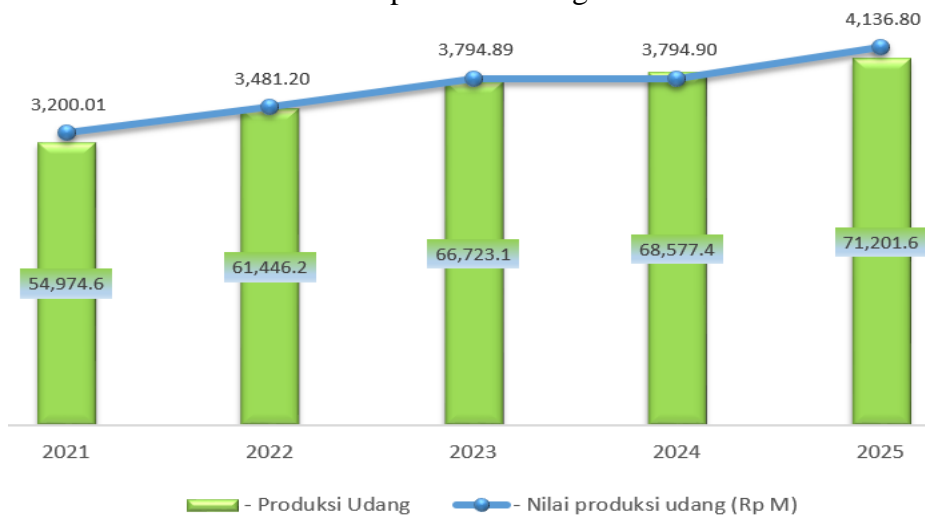
NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT				
		Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
TOTAL		4.509,479,4	4.018.692,4	4.014.695,1	3.796.733,3	3.844.803,2

Tahun 2020 sampai dengan 2024 Provinsi Sulawesi Selatan dinobatkan pada peringkat I sebagai penghasil rumput laut terbesar nasional.

Udang

Capaian produksi udang pada tahun 2025 sebesar 71.201,6 ton, mengalami kenaikan sebesar 8,76 % dibandingkan tahun 2024 sebesar 68.577,4 ton. Berdasarkan informasi dari Kabupaten/Kota salah satu yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi udang adalah kondisi lahan tambak yang ideal serta harga udang yang stabil ikut mempengaruhi antusiasme pembudidaya dalam melakukan usaha budidaya udang.

Grafik Produksi dan nilai produksi udang Provinsi Sulawesi Selatan



Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi udang adalah Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya untuk pemantauan penyakit ikan serta pemantauan lingkungan budidaya. Selain itu dilakukan pemantauan

dan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Pada tahun 2022 – 2024 Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat IV penghasil udang nasional terbesar.

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja adalah penyediaan benur berkualitas melalui produksi benur UPT PBAPL berupa dukungan operasional (pengadaan induk berkualitas, pakan dan obat-obatan), jaminan bebas virus melalui hasil uji PCR agar dapat menjamin kualitas benur yang beredar di Sulawesi Selatan guna meningkatkan keberhasilan usaha budidaya dan minat pembeli agar menggunakan benur hasil produksi dari UPT PBAPL, selain itu dilakukan penyediaan prasarana seperti laboratorium untuk menunjang aktivitas UPT PBAPL.

Tabel 29.
Ketersediaan Benur UPT PBAPL tahun 2021 -2025

Tahun	Target (ekor)			Realisasi (ekor)			Capaian (%)		
	Penjualan (PAD)	Bantuan	Total	Penjualan (PAD)	Bantuan	Total	Penjualan (PAD)	Bantuan	Total
2021	20.000.000	6.500.000	26.500.000	20.834.500	7.280.000	28.114.500	104,17	112,0	106,09
2022	14.500.000	7.500.000	22.000.000	9.682.000	7.590.000	17.272.000	66,77	101,2	78,51
2023	9.100.000	900.000	10.000.000	10.358.000	900.000	11.258.000	113,28	100	112,58
2024	10.000.000	10.000.000	20.000.000	1.355.000	0	1.355.000	133,55	0	6,78
2025	6.000.000	-	6.000.000	4.960.000	0	4.960.000	82,67	0	82,67

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah upaya dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan budidaya perikanan khususnya budidaya air payau dan laut. Ketersediaan benur berkualitas adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan UPT PBAPL dalam rangka menyentuh pelaku usaha budidaya udang berupa bantuan benur dan sebagai sumber penerimaan PAD.

b. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencapai realisasi sebesar 98,25 % dari target dan mengalami kenaikan sebesar 0,21 % dibandingkan dengan tahun 2024 dengan peningkatan rata-rata produksi sebesar 7,24 % dalam rentang tahun 2021-2025. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 466.421,3 ton dengan kenaikan sebesar 0,19 % dibandingkan tahun 2024, dan produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar naik 0,48 % dibandingkan tahun 2024.

Tabel 30.

Realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi budidaya tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025*
Penangkapan di laut	375.833,2	391.316,30	460.854,0	465.546,3	466.421,2
Penangkapan di perairan umum	41.557,52	45.419,40	43.851,3	45.810,1	46.028,5
Total Produksi Perikanan tangkap (ton)	417.410,7	436.735,7	504.709,0	511.356,4	512.449,83

Perlambatan pertumbuhan produksi tangkap dipengaruhi penurunan hasil tangkapan beberapa komoditi unggulan seperti ikan tuna turun sebesar 1,04 %, ikan cakalang sebesar 1,93 %, ikan tongkol 19,63 %, ikan kerapu turun sebesar 3,87, gurita turun 9,47 % , dan teripang turun 27,04 %. Hal ini disebabkan produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan.

Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap adalah pengembangan pelabuhan perikanan agar memenuhi standar operasional. Standar operasional pelabuhan perikanan harus memenuhi minimal 3 standar operasional yang dipersyaratkan antara lain yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 19 pelabuhan perikanan dengan jumlah pelabuhan yang memenuhi standar operasional sebanyak 17 pelabuhan.

Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional tahun 2025

NO	Pelabuhan Perikanan	Kabupaten/ Kota	Pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional jika memenuhi minimal 3 kriteria (sesuai IKK LPPD Peremdagri 28 tahun 2020)						Ket.
			Telah operasional	Penetapan kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran	Menyusun WKOPP	Menerapkan CPIB	
A PELABUHAN WILAYAH I									
1	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Maros	√		√	√			MS
2	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Pangkep	√		√	√			MS
3	Pelabuhan Perikanan Polejwa	Barro			√				TMS
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Barro	√		√	√			MS
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Pare-pare	√		√	√			MS
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Bone	√		√	√			MS
7	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Luwu	√		√	√			MS
8	Pelabuhan Perikanan Balambang	Luwu	√		√	√			MS
9	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	√		√	√			MS
10	Pelabuhan Perikanan Lero	Pinrang	√		√	√			MS
B PELABUHAN WILAYAH II									
11	Pelabuhan Perikanan Paotere	Makassar	√		√	√			MS
12	Pelabuhan Perikanan Lappa	Sinjai	√		√	√			MS
13	Pelabuhan Perikanan Kajang	Bulukumba	√		√	√			MS
14	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Bulukumba	√		√	√			MS
15	Pelabuhan Perikanan Birea	Bantaeng	√	√	√	√			MS
16	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Jeneponto	√		√				TMS
17	Pelabuhan Perikanan Beba	Takalar	√		√	√			MS
18	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Gowa	√		√	√			MS
19	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kep. Selayar	√	√	√	√			MS

Keterangan : MS = memenuhi standar operasional, TMS = Tidak memenuhi standar operasional

Terkait kedua pelabuhan yang belum memenuhi standar operasional, maka perlu dibuat pertimbangan teknis terkait pengembangan pelabuhan perikanan dimasa yang akan datang karena pengembangan pelabuhan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah sarana prasarana yang telah terbangun di Pelabuhan perikanan hingga tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31.
Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Tahun 2019-2025

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
2	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
3	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) , pemasangan instalasi listrik

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
			(2023),rehab TPI (2024) Rehabilitasi Jalan dan Drainase Kompleks Pelabuhan Perikanan (2024)
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	Rehab TPI (2021) , rahab gedung TPI (2022), Tempat pembuangan sampah (2023), rehab gedung kantor PPI (2023)
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehabilitasi Kantor 120 Meter PPI Cempae (2021) , pengadaan portal (2025)
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	Jalan Kompleks PPI Lonrae 312.5 Meter (2020) Rehab Kantor UPT Pelabuhan wil 1 (2021) , rehab TPI (2022), Jalan kompleks PPI (2022), rehabilitasi turap (2025), pengadaan portal (2025)
7	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	Jaringan instalasi listrik PPI (2021) Turap penahan tanah di PPI (2021) Fasilitas air (tawar) bersih (2021)
8	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	Pengadaan air bersih (2019) , penngadaan mesin pompa (2025), kontainer sampah (2025), pengadaan portal (2025)
9	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Lappa(2021) , Rehab TPI (2023), pengadaan portal (2025)
10	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	Rehabilitasi pelataran PPI Kajang (2019), Jaringan listrik PPI Kajang (2020), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) , Rehab TPI (2024), pengadaan portal (2025), mesin pompa (2025)
11	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari (2019), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Bontobahari(2022), Rehab TPI (2023)
12	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehab Wisma Nelayan dan Penataan Lingkungan PPI Birea (2021) Rehab drainase (2023), Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk travo (2023)

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
13	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	Penataan PPI Beba(2019), sarana operasional kesyahbandaran (2022), rahab TPI (2022). jaringan dan instalasi listrik (2022), Penyusunan Andalalin (2023), dokumen UKL UPL (2023), pembangunan IPAL (2023) , Breakwater (2023), Fasilitasi air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar, menara dan tank (fisik tidak selesai 46 %) (2023), Rehab drainase (2023), Breakwater tahap II (2024), penyusunan AMDAL (2025), pengadaan portal (2025)
14.	Pelabuhan perikanan Bontobahari	Kab. Maros	Rehab TPI (2023)
15	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	Pembuatan pagar (2023)
16	Pelabuhan perikanan ujung lero	Kab. Pinrang	pengadaan mesin pompa (2025), pengadaan portal (2025)

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Beberapa hal yang menunjang peningkatan produksi perikanan melalui pelaksanaan program prioritas yang telah dilakukann tahun 2025 diantaranya :

1. bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut berupa bibit, tali dan pelampung kepada 2.000 orang pembudidaya.
2. penyediaan rumah bibit rumput laut *Kappaphycus Alvarezil* 1 unit.
3. Bantuan penyaluran benih air tawar IPIAT Lajoa
4. penyediaan benur UPT PBAPL melalui dukungan penyediaan induk udang windu mendukung operasional UPT PBAPL
5. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
6. pengadaan minibioflok budidaya ikan air tawar 1 set

7. bantuan kapal 123 unit (kapal 1 GT sebanyak 100 unit, kapal 5 GT sebanyak 20 unit, kapal 15 GT sebanyak 3 unit)
8. Bantuan alat tangkap /alat bantu tangkap berupa rumpon 130 unit, alat tangkap sero 1 unit, bantuan mesin kapal penangkap ikan di perairan umum daratan 10 PK 3 unit, fasilitasi jaminan asuransi bagi pekerja rentan 1.000 nelayan.
9. Penyediaan sarana prasarana pelabuhan berupa pengembangan sarana prasaran sentra produksi perikanan seperti rehabilitasi turap PPI Lonrae, pengadaan portal dan sarana kebersihan di pelabuhan.



Penting dan untuk diperhatikan:

1. Kartu Peserta Digital Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Kelnegajepan dan tidak dapat dipinaltangkakan serta dipinjamkan.
2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Kelnegajepan:
 - a. Kewajiban peserta BPJS Kelnegajepan adalah sebagai berikut:
 - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal tertunda membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
 - Mengampaikan perubahan/pengiriman data peserta maupun susunan keluarga.
 - b. Hak peserta BPJS Kelnegajepan antara lain adalah:
 - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tersebut lainnya.
 - Mendapatkan akses dan kumulatif BPJS Kelnegajepan.
3. Informasi tanda bukti, kewajiban dan hak kepesertaan BPJS Kelnegajepan Anda pada kelengkapan kartu.
4. Jika Anda pindah Sisa (sisa) Peserta Kerja, seperti Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha (Badan Usaha) yang lain.
5. Segera melaporkan perubahan/kelekasanaan data kepesertaan Anda kepada Panitia Kerjasama Usaha atau kantor cabang BPJS Kelnegajepan terafiliasi. Apabila tidak terafiliasi, segera melaporkan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Kelnegajepan dengan benar dan tidak ada perubahan.
6. BPJS Kelnegajepan tidak pernah meminta Anda untuk memberikan kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Kelnegajepan.
7. Penghapusan kartu peserta ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab Anda.



Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian peningkatan produksi perikanan kedepan akan dilakukan peningkatan produktifitas melalui pemberian bantuan sarana prasarana pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan sarana prasarana dan tata kelola pelabuhan perikanan, serta inovasi penerapan teknologi.

IK-2, Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan BPS. Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur konsumsi ikan adalah sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{total produksi} - \text{produksi bukan bahan makanan}) - \text{ekspor} - 7\%}{(\text{jumlah penduduk 2022} + \text{jumlah penduduk 2023} / 2)}$$

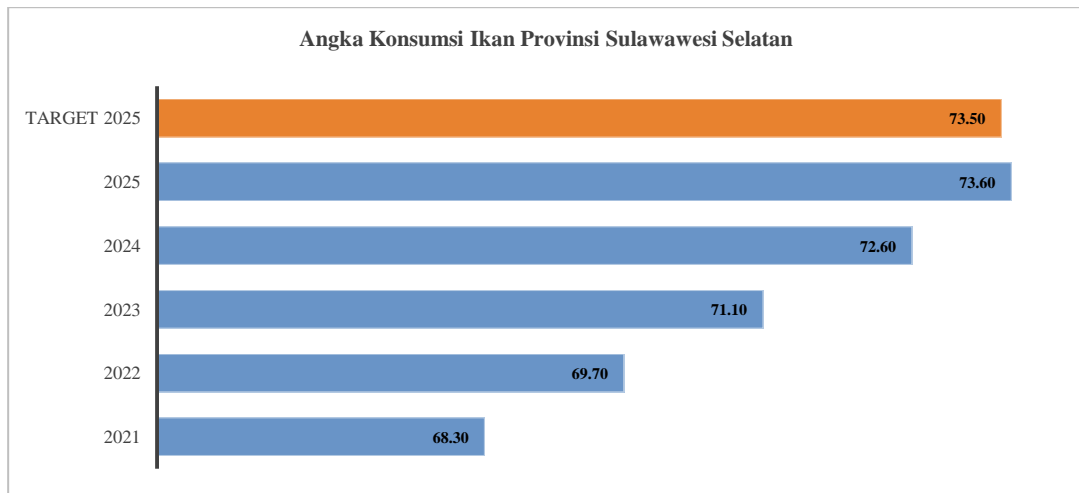
Keterangan : 7 % adalah data produk diantarpulau yang tak terhitung (range 0 – 15 %)

Tabel 32.
Capaian Kinerja indikator sasaran Konsumsi Ikan Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2025			Akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	68,3	69,5	71.10	72.60	73,60	73,50	100,14	81,70	89,23

Nilai sementara angka konsumsi ikan sebesar 73,60 % mencapai target sebesar 100,14 % dan naik 0,41 % dibandingkan tahun 2024. Kurun waktu 2021-2025 angka konsumsi ikan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,96 %.

Mulai tahun 2025, istilah Angka Konsumsi Ikan (AKI) resmi diganti menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Perubahan ini bertujuan untuk mengukur tingkat konsumsi ikan per kapita dengan lebih akurat sebagai bagian dari program pengembangan inovasi produk olahan ikan. Sehingga capaian kinerja AKI terhadap target nasional tidak bisa diperbandingkan



Faktor pendorong capaian kinerja memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi. Hal ini di dukung dengan pencapaian produksi perikanan tangkap, produksi budidaya dan peningkatan produksi olahan ikan konsumsi. Selain itu keikutsertaan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan penyediaan pangan terjangkau.

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Beberapa hal yang menunjang peningkatan konsumsi ikan melalui pelaksanaan program prioritas yang telah dilakukann tahun 2025 diantaranya :

1. Bantuan sarana pengolahan/pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan untuk Poklaksar Dapur Rusda di Kab. Pinrang
2. Pelaksanaan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan/Edukasi (GEMARIKAN) Pentingnya Protein Ikan untuk anak usia sekolah dasar di Kab.Jeneponto dan Kab.Maros.
3. Pembinaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
4. Pengujian mutu produk perikanan yang melayani layanan sertifikasi hasil uji bagi perusahaan perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan

- Promosi produk olahan perikanan bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dengan berbagai jenis produk olahan ikan sebagai alternatif dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak



Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Sinergi DKP dan TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan



Sarana pengolahan untuk Poklhasar Dapur Rusda di Kabupaten Pinrang



Pengujian mutu produk perikanan dan keikutsertaan dalam pameran

Penjelasan tiga faktor yang mempengaruhi angka konsumsi ikan sebagai berikut :

a. Produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan

Tabel 33.
Realisasi Indikator kinerja Produksi Olahan dan Nilai produksi Olahan

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2025	Capaian
Nilai ekonomi hasil perikanan (perikanan tangkap, budidaya, pengolahan (Rp T)	26,6	33,5	32,1	30,6	33,8	32,03	105,68
Produksi olahan hasil perikanan (Ton)	6.064,47	5.911,6	7.235,83	6.956,12	7.048,5	7.311,4	96,40

Capaian produksi olahan hasil perikanan mencapai target 96.40 % dan meningkat 1,33 % dibandingkan tahun 2024. Kurun waktu tahun 2021 – 2022 produksi olahan meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,78 %. Faktor pendorong peningkatan produksi adalah keterlibatan UPI sebagai supplier bahan baku Makan Bergizi Gratis. Jumlah UPI tersebar di 24 Kabupaten /Kota sebanyak 1.653 unit tahun 2024 menjadi 1.776 unit tahun 2025 yang bergerak di fermentasi ikan, pelumatan daging /surimi, pembekuan ikan, pemindangan ikan, penanganan produk segar dan dingin, pengalengan ikan, pegasapan ikan, penggaraman ikan, pengolahan lainnya, serta pereduksian dan ekstraksi.

Upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah dengan melakukan promosi produk (olahan) perikanan melalui pameran dan keikutsertaan dalam Gerakan Pangan Murah (GMP) diharapkan dapat menstimulasi perkembangan dan peningkatan produksi olahan. Pembinaan UPI dalam rangka penerbitan Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar. Manfaat SKP memberikan jaminan mutu dan keamanan pada

produk perikanan yang diproduksi, memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan (SNI untuk produk yang diperdagangkan di pasar dalam negeri atau standar negara *buyer* untuk produk yang diekspor) hingga memperluas pasar sehingga omzet meningkat.

Tabel 34.
Jumlah UPI, UPI ber SKP dan SKP terbit tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Total UPI	1,425	1,565	1,543	1.653	1.776
Jumlah UPI Bersertifikat Kelayakan Pengolahan	98	91	108	128	112
SKP terbit (lembar)	352	199	320	241	311

Catatan : SKP terbit per 2 tahun sehingga yang terbit pada tahun 2023 kemungkinan besar mengajukan di tahun 2025

b. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan

Produk hasil kelautan dan perikanan memenuhi standar pangan jika telah melalui proses Pengujian mutu produk perikanan dimana UPT Balai Pengujian Mutu Produk Perikanan (BPMPP) melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan dan penerapan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk hasil perikanan. Dalam rangka pembinaan mutu, pada tahun 2025 ditargetkan sertifikat hasil uji mutu sebanyak 1.200 sertifikat dan yang terealisasi sebanyak 1.776 sertifikat.

Tabel 35.
Realisasi Indikator kinerja Persentase Pengujian Pembinaan Mutu Produk Perikanan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------	------	------	------	------	------	------

Jumlah sertifikat hasil uji mutu yang diterbitkan	1.492	1.056	1.123	1423	1653	1.776
---	-------	-------	-------	------	------	-------

Faktor pendorong capaian adalah adanya sub kontrak dari BPMPP adalah inovasi pelayanan *online* melalui *website e-Sejuta ikan* yang mudah diakses dimanapun dan kapan pun, pembayaran dapat melalui nontunai (kode QRIS), penjemputan sampel gratis untuk area makassar serta hasil uji dapat didownload oleh customer melalui akun masing-masing. UPT BPMPP merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan rangka meningkatkan capaian angka konsumsi ikan antara lain melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), dan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan.

IK-3, Nilai Tukar Pembudidaya

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) adalah salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari dan biaya usaha budidaya. Data NTUP bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tukar Pembudidaya} = \frac{\text{Indeks yang diterima pembudidaya (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar pembudidaya (Ib)}}$$

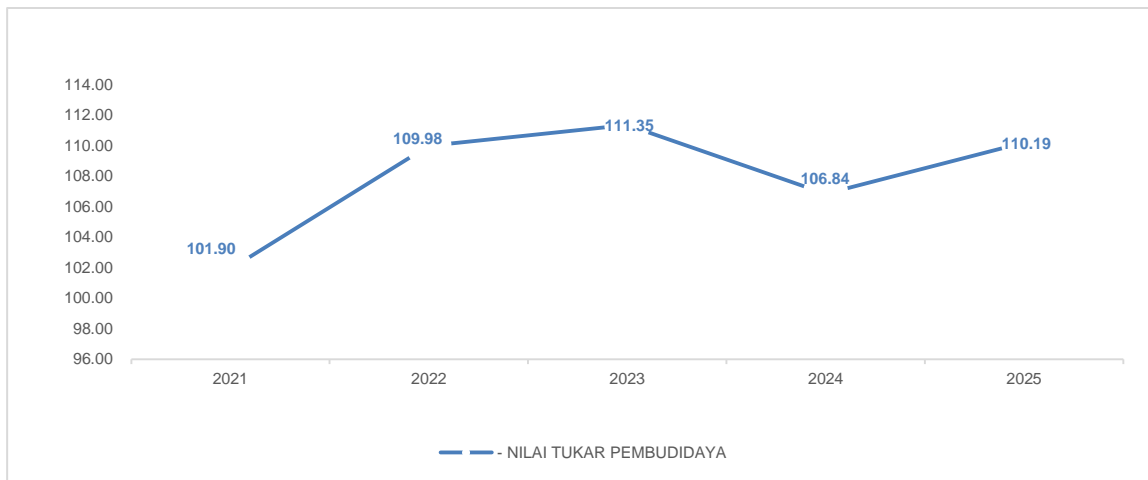
Tabel 36.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 6 Nilai Tukar Pembudidaya

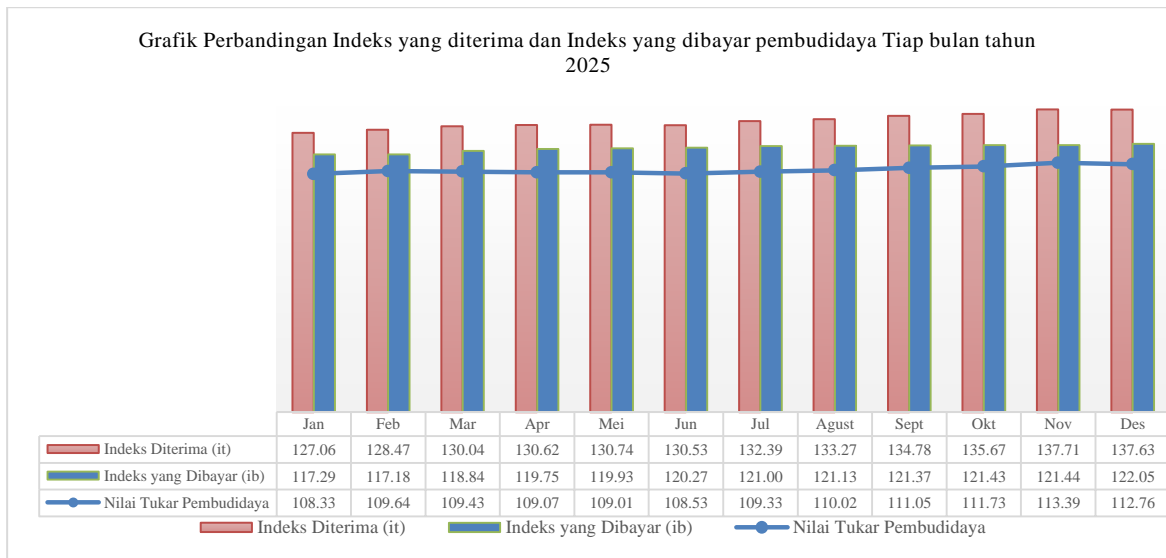
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2025			Target akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian

Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101.90	109.98	111.35	106,84	110,19	109,83	100,33 %	133,6	82,48
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------

Nilai tukar pembudidaya mencapai target 100,3 % naik 3,14 % dibandingkan tahun 2024 dimana kurun waktu tahun 2021-2025 kenaikan rata-rata NTPi sebesar 3,58 % dimana NTPi di tahun 2025 merupakan nilai tertinggi.



Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi. Pada kurun waktu bulan januari - Desember tahun 2025 rata-rata indeks yang diterima pembudidaya (it) sebesar 132,14 lebih tinggi dibandingkan rata-rata indeks yang dibayar nelayan (ib) sebesar 120,14. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai produksi perikanan budidaya khususnya komoditi rumput laut yang mengalami peningkatan.



Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja telah dijelaskan sebelumnya pada point peningkatan produksi perikanan (produksi perikanan budidaya).

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga produktivitas pembudidaya dan stabilitas harga komoditas di tingkat pembudidaya dengan meminimalkan biaya operasional (pengeluaran). Oleh karena itu, Dinas kelautan dan perikanan melaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasaran produksi seperti distribusi benih ikan, bibit rumput laut agar usaha budidaya ikan dapat terus berlangsung dan terjaga.

IK-4, Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (*It*) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (*Ib*). Nilai Tukar Nelayan atau NTN digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dengan melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari

produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Data NTN bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

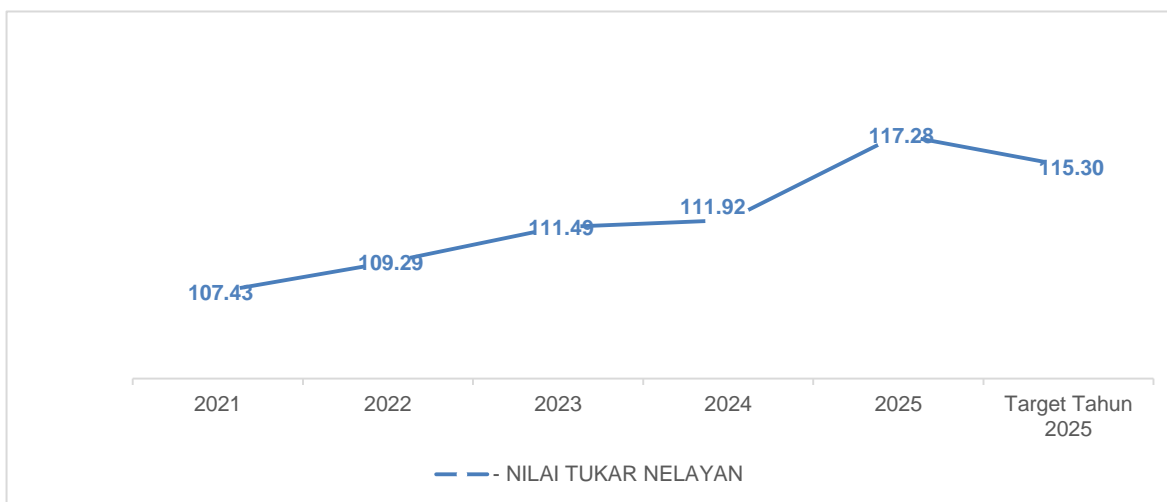
$$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (Ib)}}$$

Tabel 37.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 7 Nilai Tukar Nelayan

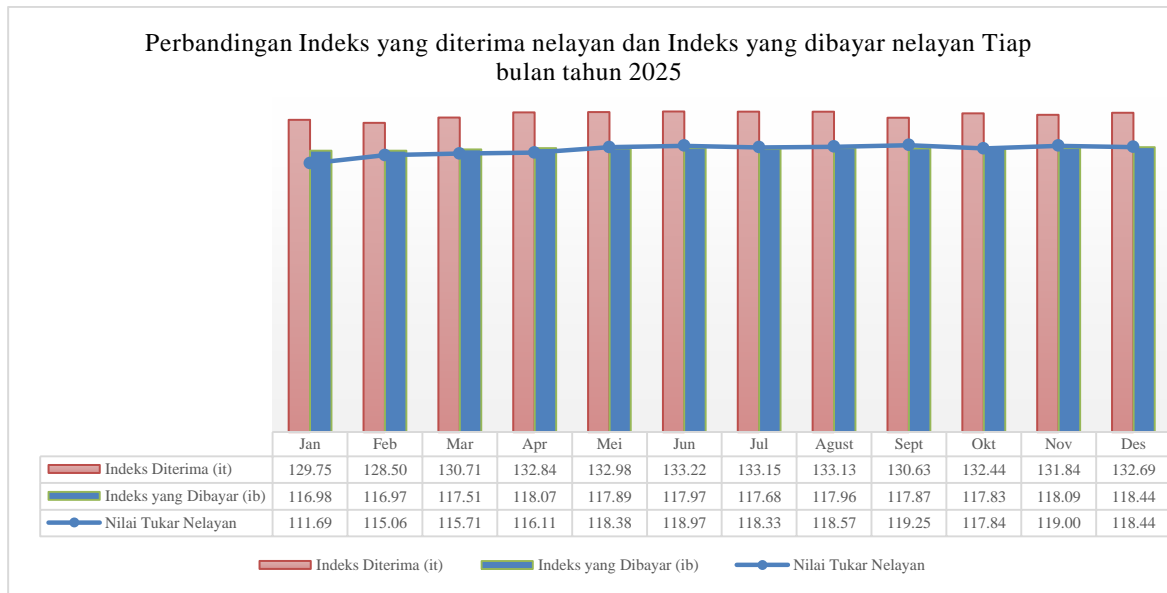
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2025			Target akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,43	109,29	111,49	111,92	117,28	115,3	101,7	133,6	83,77

Nilai tukar nelayan terealisasi 117.28 mencapai target 101.7 % dan naik 4,8 % dibandingkan tahun 2024 dengan peningkatan rata-rata sebesar 4,18 % kurun waktu 2021-2025 dengan realisasi tertinggi NTN di tahun 2025 ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan semakin membaik karena peningkatan pendapatan nelayan. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah adanya peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap melalui perbaikan teknologi penangkapan ikan.

NTN menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Kurun waktu bulan Januari - Desember tahun 2025 rata-rata indeks yang diterima nelayan (it) sebesar 141,11 sedangkan rata-rata indeks yang dibayar nelayan (ib) sebesar 120,31. NTN berada diatas 100 artinya kenaikan harga rata-rata yang diterima nelayan lebih besar dengan yang dibayarkan atau usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usah



masyarakat.



rogram /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja telah dijelaskan sebelumnya pada point peningkatan produksi perikanan (produksi perikanan tangkap).

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan nelayan adalah alat bantu tangkap seperti rumpon untuk mengefisiensikan biaya operasional, fasilitasi pembangunan SPDN di pelabuhan ke Kementerian untuk mempermudah akses nelayan terhadap kebutuhan BBM.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis II diukur dengan dua indikator yaitu : (1) Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola dan (2) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Tabel 38
Capaian Indikator Sasaran Strategis III Meningkatkan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	82	79,24	96,63
	Luas kawasan konservasi yang dikelola (%)	821.561,69	821.561,69	100

IK-5, Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Perundangan yang Berlaku

Sebagaimana penjelasan sebelumnya capaian indikator kepatuhan sebelumnya, evaluasi indikator untuk triwulan IV mengalami perubahan atau menyesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berupa rumus perhitungan.yaitu :

$$\text{Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan} = \frac{\text{Pelaku usaha yang patuh}}{\text{Pelaku usaha yang diawasi}}$$

Tabel 39.
Capaian Indikator Sasaran Startegis III IKU 5 Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan

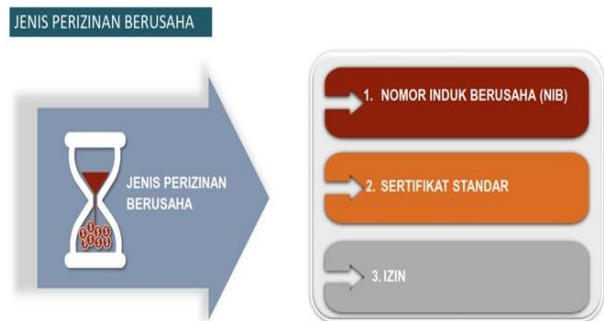
Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Tahun 2025			Akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan	63,87	81,97	77,16	71,67	78,91	82,0	96,63	93	84,85

perikanan								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : olahan data hasil pengawasan kepatuhan unit kerja
 Keterangan : data realisasi menyesuaikan formulasi terbaru

Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan adalah hasil perhitungan kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan seperti nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan, pemasar perikanan, penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan. Pelaku usaha yang Patuh adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan kelautan. Pelaku usaha ini memenuhi persyaratan perizinan, menerapkan praktik penangkapan atau budidaya yang berkelanjutan, mematuhi ketentuan konservasi sumber daya ikan dan ekosistem laut, serta menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan. Kepatuhan tersebut mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam mendukung kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat. Pelaku Usaha yang diawasi adalah pelaku usaha yang kegiatan usahanya berada dalam pengawasan instansi berwenang untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan di sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek perizinan, tata cara penangkapan atau budidaya, penggunaan alat dan sarana, pengelolaan hasil perikanan, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menjaga elestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terealisasi 78,91 % atau mencapai 96,63 % terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2024



sebesar 71,61 %.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha (perdirjenPSDKP nomor 21 tahun 2021).

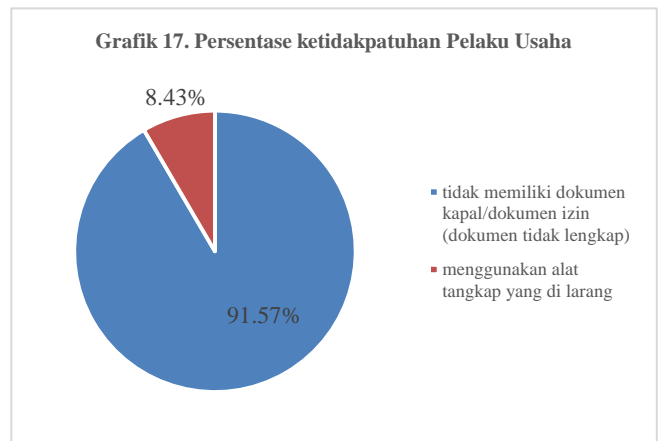
Ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pemenuhan dokumen perizinan/dokumen kapal tidak ada/tidak lengkap/masa berlaku habis. Kendala yang dihadapi adalah pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku, beralihnya proses perizinan melalui OSS

dan tidak adanya aksesibilitas untuk mengurus perizinan. Sesuai dengan PP no 5 tahun 2021 Pasal 6 ayat 2 perizinan usaha berdasarkan risiko diberlakukan untuk 16 bidang usaha termasuk kelautan dan perikanan. Diperlukan strategi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas peralihan pengurusan

dokumen perizinan yaitu dilaksanakan fasilitasi Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan informasi, sosialisasi pemenuhan dokumen kapal, membantu nelayan mengakses pelayanan melalui Gerai Perizinan yang ada di Pelabuhan Perikanan dan pembinaan kepada pelaku usaha pemula dengan melibatkan penyuluh perikanan setempat untuk pemenuhan standar /aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

Penjelasan faktor yang mempengaruhi persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan sebagai berikut :

a. Cakupan Pengawasan Sumberdaya kelautan perikanan



Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah estimasi persentase jumlah pelaku usaha yang diperiksa dari rencana target total pelaku usaha yang akan diperiksa. Rumus menghitung cakupan pengawasan SDKP adalah :

$$\text{Cakupan Pengawasan SDKP} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang diawasi} \times 100 \%}{\text{Target pelaku usaha yang diawasi}}$$

Tabel 40.
Perkembangan Cakupan Pengawasan SDKP Tahun 2020 -2025

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pelaku Usaha yang diawasi	357	403	554	744	844
Target Pelaku usaha yang diawasi	357	403	554	681	713
Cakupan pengawasan SDKP	100	100	100	109,25	118,4

Tingginya capaian kinerja didukung aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh unit kerja di pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi perikanan.



Aktivitas pengawasan kepada 6 komponen pelaku usaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi

Tabel 41.
Capaian hasil pengawasan kepatuhan pelaku usaha sumberdaya Kelautan & Perikanan Tahun 2021-2025

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Usaha perikanan tangkap sampai	357	403	554	713	829	63,87	81,14	77,98	72,66	79,61

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	dengan 12 mil										
2	Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	8	7	13	5	-	100	57,14	46,15	40
3	Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	2	2	3	2	-	100	50,0	0	0
4	Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	5	3	4	2	-	100	33,33	75,0	100
5	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	9	7	12	0	-	88,89	100	66,67	-
6	Pemanfaat ruang laut	-	-	5	3	6	-	-	20	33,33	33,33
Total pelaku usaha yang diperiksa ; Persentase kepatuhan		357	427	578	748	844	63,87	81,97	77,16	71,67	78,91

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah telah dilakukan pengawasan secara intens menanggapi permasalahan pelaku usaha dalam mengakses dokumen usaha yang harus diakses melalui aplikasi *online* seperti Nomor Induk Berusaha. Jika dilihat dari jumlah penanganan kasus sebagaimana tabel berikut, menunjukkan bahwa upaya-upaya pengawasan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan harus terus dilakukan dan memerlukan dukungan berbagai pihak terkait.

Tabel 43.
Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

NO	Wilayah Kerja	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Wilayah Selatan	3	-	-	-	-

2	Maminasata	4	2	1	3	4
3	Bosowasi	8	7	5	8	7
4	Ajatappareng	-	-	-	-	-
5	Luwu Raya	-	-	-	-	1
6	Selayar	3	1	-	-	1
7	Pangkep	4	3	4	5	6
TOTAL KASUS			22	13	10	19

Sebanyak 19 kasus yang ditangani tahun 2025 terdiri dari 11 kasus *illegal fishing* dan 8 kasus *destructive fishing*. Luasnya wilayah laut yang perlu diawasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing* mulai dari keterbatasan personil pengawasan dan sarana pengawasan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas. Hal yang perlu dilakukan adalah perlunya melibatkan stakeholder terkait melalui koordinasi dan kolaborasi, peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya untuk atasi *destructive fishing* melalui sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan melibatkan seluruh pihak terkait, pembinaan pokmaswas, SDM pengawasan yang terdidik dan terlatih dalam keahlian pengawasan dan serta sarana prasarana pengawasan yang memadai.

Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu bentuk keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang capaian kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan
2. Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di laut sampai dengan 12 mil untuk pencegahan tindak pidana di laut, serta memastikan nelayan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan

3. Sosialisasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Kegiatan Budidaya guna meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha) terkait zonasi, regulasi dan prosedur perizinan
4. Penumbuhan dan pengembangan pokmaswas melalui rakor evaluasi pokmasawas, dan penilaian pokmaswas aktif

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja, DKP Provinsi Sulawesi Selatan terus intens berkoordinasi dalam rangka penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP), mengoptimalkan operasi kapal pengawas melalui patroli terpadu, pengadaan kapal pengawas dan pelayanan antar pulau, serta fasilitasi NIB dan KUSUKA.

IK-6, Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola

Kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2016 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Formulasi untuk mengukur adalah :

luas kawasan konservasi perairan yang dikelola

= total luas kawasan konservasi yang telah ber SK menteri atau sedang berproses SK menteri

Tabel 43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 6 Luas Kawasan Konservasi yang dikelola

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2025			Akhir RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola (Ha)	*	569.269,57	569.269,57	578.435,53	829.561,67	829.561,67	100	847,122,4	97,93

Keterangan* : luas kawasan konservasi menggunakan data base perda nomor 3 tahun 2022

Luas kawasan konservasi yang dikelola sebesar 829.561,67 Ha atau mencapai target sebesar 100 %. Sampai dengan tahun 2025 ditargetkan 8 kawasan ditetapkan SK

Menteri KKP atau berproses SK Menteri KKP , terealisasi 5 kawasan dengan luas 578.435,53 Ha telah ber SK Menteri sementara tiga Kawasan lainnya yaitu KKPD Teluk Bone sedang berproses untuk penetapan SK (proses verifikasi KKP), Pulau Lanjukang, Kota Makasar dalam proses perbaikan hasil review KKP, dan Pulau Tanakeke, Kab. Takalar sedang dalam proses konsultasi publik. Tahun 2023 tidak ada progress perluasan kawasan konservasi karena fokus anggaran pada pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan KKP sebagai tindak lanjut arahan dari KKP dan Kemendagri di acara pertemuan Rakortekbangda agar OPD memprioritaskan penganggaran Kawasan Konservasi yang telah memiliki SK Menteri untuk disusun rencana pengelolaannya.

Penjelasan faktor yang mempengaruhi luas kawasan konservasi daerah yang dikelola secara berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Persentase kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan

Perluasan kawasan konservasi laut merupakan program utama di sektor kelautan dan perikanan yang berbasis **Ekonomi Biru**. Upaya yang dilakukan adalah akselerasi penetapan kawasan konservasi melalui SK Menteri agar kawasan konservasi dapat dikelola secara efektif. Telah dilaksanakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan akan dilaksanakan kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk percepatan penetapan Kawasan Konservasi

Tabel 44.
Persentase Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola Tahun 2020 - 2025

Uraian	Tahun						Target	Capaian
	2021	2022	2023	2024	2025			
Luas Kawasan Konservasi yang telah SK Menteri	*	569.269,57	569.269,57	578.435,53	829.561,67	829.561,67	100	
Total Luas Kawasan Konservasi sesuai Perda (Ha)	*	849.969,66	849.969,66	849.969,66	849.969,66	849.969,66	*	
Persentase luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelolal (%)	*	66,98	66,98	68,05	97,60	97,60	100	

Selain itu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi melalui upaya rehabilitasi kawasan mangrove sebagai daerah perlindungan laut (DPL), dimana tahun 2025 terdapat kegiatan Penanaman mangrove sebanyak 249.233 batang (6.23 Ha); transplantasi karang sebanyak 7.334 unit = 0,83 Ha, apartemen ikan sebanyak 1657 set = 13 Ha, serta kegiatan pemeliharaan mangrove yang telah ditanam di tahun sebelumnya di 6 (enam) wilayah kerja Cabang Dinas.

Tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan SK Menteri selanjutnya perlu menunjuk unit pengelola kawasan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun dan menetapkan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi serta melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan.

Tabel 46.
Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola

No	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Luas Kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KKP	Nilai Evika	Keterangan
A	KKPD/KKP3K	849.969,66	578.435,53		
1.	Tanalili Kab. Luwu Utara	1.510,53			
2.	Liukang Tupabiring Kab. Pangkep	63.582,49	63.407,23	38,53	SK Menteri KKP nomor 71 tahun 2022
3.	Pulau Liukang Tangaya Kab. Pangkep	508.534,4	505.862,3	44,35	SK Menteri KKP nomor 72 tahun 2022
4.	Teluk Bone (Bone dan Sinjai)	238.093,55	-		Tahun 2024 Sinergi dengan anggaran Pusat. Proses menunggu SK Menteri (proses verifikasi KKP namun petanya ada perbaikan)
5.	Pasi Gusung Kep. Selayar	1.769,73	1.780,05	16,92	SK Menteri KKP nomor 36 tahun 2024
6.	Kayuadi Kep. Selayar	6.899,43	6.892,41	12,85	SK Menteri KKP nomor 34 tahun 2024
7.	Pulau Pannikiang Kab. Barru	496,8	496,8	12,85	SK Menteri KKP nomor 35 tahun 2024
8.	Bilongka Luwu	1.212,28			
9.	Malili Luwu timur	1.583,63			

No	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Luas Kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KKP	Nilai Evika	Keterangan
10.	Pulau Lanyukang Makassar	1.659,99	-		Tahun 2025 Berkolaborasi dengan YKL, sementara perbaikan dokumen dan peta hasil review KKP
11.	Pulau Sembilan Sinjai	13.190,15			
12.	Pulau Tanakeke Takalar	11.372,6	-		Tahun 2025, Kolaborasi dengan blue forest proses konsultasi publik
13.	KKM Bontobahari pembuatan kapal Phinisi Bulukimba	64,18			
			578.742,49		

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Program /kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah

1. Dukungan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi kolaborasi dengan NGO/LSM
2. Rehabilitasi wilayah pesisir (rehabilitasi mangrove dan terumbu karang) sebagai upaya perlindungan laut
3. Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan SDM masyarakat pesisir.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja maka DKP berkomitmen melaksanakan peningkatan SDM masyarakat pesisir diantaranya melalui Pelatihan Pengelolaan ekosistem laut dalam rangka penerapan ekonomi biru, pengembagangan ekonomi masyarakat pesisir khususnya pergaraman, kolaborasi rencana pengelolaan dan pelaksanaan aksi pengelolaan kawasan konservasi, serta Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu nilai SAKIP OPD.

Tabel 47.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	88 (A)	86,85	98,69
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis				98,69

IK-7, Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP OPD adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Formulasi Data Nilai SAKIP adalah

Nilai Sakip OPD = Lembar hasil Evaluasi Inspektorat

Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi yang bersifat tahunan, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 48.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran III IKU 7 indikator Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun -				Tahun 2025			Target RPJMD	
	2021	2022	2023	2024	Realisasi*	Taregt	Capaian	2026	Capaiam
Nilai sakip OPD	83,70	85,80	86,25	86,25	86,85	88	98,69	98,0	88,62

Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 belum tersedia, oleh karenanya data proyeksi capaian 2025 menggunakan data tahun 2024 yaitu 86,85 sehingga data sementara realisasi nilai SAKIP mencapai 98,69 % dari target. Selama kurun waktu tahun 2021 – 2025 nilai SAKIP DKP Sulawesi Selatan berada di peringkat "A". Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah adanya komitmen dari pimpinan OPD dan pimpinan

unit kerja dalam melaksanakan program kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan , dan monev, untuk memastikan tercapainya target serta perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan khususnya pimpinan masing-masing unit kerja karena dalam penyelenggaraan SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi. selain itu dibutuhkan penerapan sistem kerja yang kolaboratif antar unit kerja/antar OPD untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien.

Tabel 49.
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2025

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2021	2022	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	25,5	25,50	25,50	26,10	Menunggu jadwal evaluasi
Pengukuran Kinerja	30	24,6	25,50	25,50	25,50	Menunggu jadwal evaluasi
Pelaporan Kinerja	15	11,1	12,30	12,75	12,75	Menunggu jadwal evaluasi
Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	22,5	22,50	22,50	20,50	Menunggu jadwal evaluasi
Jumlah	100	83,7	85,80	86,25	86,85	
Kategori		A	A	A	A	

Keterangan *)Tahun 2025 menunggu hasil evaluasi inspektorat

Program /kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Program kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja adalah layanan rutin kantor diantaranya Pelaksanaan layanan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menunjang kinerja organisasi. Pelaksanaan layanan umum untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas kantor serta layanan internal kantor lainnya.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja adalah penyelesaian rekomendasi temuan hasil evaluasi atau audit pemeriksaan sebagai bahan perbaikan kinerja kedepan, serta peningkatan kapasitas SDM.

3.3. KINERJA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2025 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.716,520.956,- (135,83 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 50
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	%	Kurang (-)/ lebih (+)	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	2.000.000.000	2.716.520.956	135,83	+ 716.520.956	
A. <u>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</u>	658.740.000	969.341.706	147,15	+ 310.601.706	Sumber pendapatan terdiri dari dari sewa lahan, sewa kios, jasa parkir, cold storage, sewa pabrik dan pengolahan
- UPT Pelabuhan wil 1	302.153.000	597.937.046	197,89		
- UPT Pelabuhan wil 2	356.587.000	371.404.660	104,16		
B. <u>Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya</u>	30.740.000	42.082.000	136,90	+ 11.342.000	Sumber pendapatan terdiri dari kerjasama sewa lahan, sewa koperasi pegawai dan Sewa kantin pegawai
C. <u>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</u>	1.119.620.000	1.512.389.000	135,08	+ 392.769.000	Sumber pendapatan terdiri dari Sertifikat mutu ekspor dan surat keterangan asal, Penjualan benur, produksi KJA UPT PBAPL, dan penjualan benih air tawar BBI Lajoa Soppeng
- UPT BPMPP	819.620.000	1.235.734.000	150,77		
- UPT PBAPL	150.000.000	125.605.000	83,74		
- UPT Lajoa Soppeng	150.000.000	151.050.000	100,70		
D. <u>Retribusi pemanfaatan asset daerah</u>	190.900.000	192.675.000	100,93	+ 1.775.000	Sumber pendapatan dari kerjasama sewa tambak, kerjasama depo pemasaran ikan, dan sewa rumah dinas
E. <u>Lain-lain PAD yang sah</u>	-	33.250	-	-	Denda sewa rumah dinas

Secara keseluruhan, target PAD telah melampaui target namun masih terdapat item penerimaan PAD yang belum mencapai target yaitu penjualan benur oleh UPT PBAPL karena beberapa kendala dalam proses produksi (keterlambatan pengadaan) sehingga menghambat proses produksi benih.

b. Belanja

Tahun 2025, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 86.862.381.251,99,- dan total realisasi sebesar Rp 78.957.001.221,50,- (90,90 %), dan realisasi fisik 98,36 % . Kinerja anggaran dipengaruhi proses administrasi pengadaan /pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan waktu serta alokasi belanja pendukung sangat kecil seperti kertas, cetak, tinta printer, kertas dll sehingga membutuhkan waktu (inefisiensi waktu dan efektivitas pemilihan penyedia) dalam proses pengadaan

Tabel 51
Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2025

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		36,061,806,950.99	34,267,677,875	95.02%	98.67%
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	518,213,800.0	475,079,729.0	91.68%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,702,400.0	21,278,000.0	86.14%	100.0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7,835,600.0	6,512,000.0	83.11%	100.0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,184,000.0	2,972,000.0	93.34%	100.0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,067,600.0	6,026,500.0	99.32%	100.0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11,196,600.0	8,780,000.0	78.42%	100.0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	424,080,200.0	410,361,500.0	96.77%	100.0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,147,400.0	19,149,729.0	46.54%	100.0
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30,233,752,419.99	28,705,326,756.0	94.94%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30,213,607,069.99	28,687,865,356.0	94.95%	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	762,800.0	469,000.0	61.48%	100%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	540,900.0	196,000.0	36.24%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	828,800.0	300,000.0	36.20%	100%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	676,250.0	0.0	0.00%	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17,336,600.0	16,496,400.0	95.15%	100%
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,352,300.0	6,642,500.0	71.03%	100.00%

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan :				
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	228,300.0	0.0	0.00%	100%
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6,962,000.0	6,642,500.0	95.41%	100%
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,162,000.0	0.0	0.00%	100%
4	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8,150,000	7,828,000	96.05%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	8,150,000.0	7,828,000.0	90.25%	100%
5	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,688,750.0	14,262,350.0	51.51%	62.93%
	Sub Kegiatan :				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,265,000.0	0.0	0.00%	0.00%
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,372,000.0	0.0	0.00%	100%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,475,350.0	1,275,350.0	86.44%	100%
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13,764,400.0	12,175,000.0	88.45%	100%
5	sosialisasi peraturan perundang-undangan	812,000.0	812,000.0	100.00%	100%
6	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,371,518	385,750,234	91.55%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,269,200.0	5,769,300.0	92.03%	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,576,718.0	43,853,118.0	96.22%	100%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,956,800.0	1,908,000.0	97.51%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	41,179,900.0	40,469,965.0	98.28%	100%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,067,400.0	13,619,400.0	84.76%	100%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309,946,900.0	280,130,451.0	90.38%	100%
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	374,600.0	0.0	0.00%	100%

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
7	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,695,757,736.0	4,567,296,734.0	97.26%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	882,411,924.0	833,956,033.0	94.51%	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,375,000.0	36,245,000.0	94.45%	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,774,970,812.0	3,697,095,701.0	97.94%	100%
8	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,520,427.0	105,491,572.0	71.51%	78.91%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,214,400.0	33,801,400.0	86.20%	87.41%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,107,150.0	18,378,926.0	73.20%	95.22%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,957,200.0	13,673,688.0	97.97%	100%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69,241,677.0	39,637,558.0	57.25%	63.93%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15,403,256,800	13,799,122,350	89.59%	99.98%
1	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15,154,475,900	13,566,888,750	89.52%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	31,226,000.0	25,773,210.0	82.54%	100%
2	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13,519,970,600.0	11,981,446,540.0	88.62%	100%
3	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	230,000.0	230,000.0	100.00%	100%
4	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	1,603,049,300.0	1,559,439,000.0	97.28%	100%

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
2	Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1,174,600.0	204,400.0	17.40%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	970,200.0	0.0	0.0%	100%
2	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	204,400.0	204,400.0	100.0%	100%
3	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	247,606,300.0	232,029,200.0	93.7%	98.76%
	Sub Kegiatan :				
1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	244,536,300.0	232,029,200.0	94.89%	100%
2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,170,000.0	0.0	0.00%	0%
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	900,000.0	0.0	0.00%	0%
III	Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	23,032,785,775	21,017,626,375	91.25%	98.39%
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil	18,144,525,100	16,998,835,018.0	93.69%	99.99%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	2,121,200.0	0.0	0.00%	0.0
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	12,548,508,700.0	11,984,420,000.0	95.50%	100%
3	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5,593,895,200.0	5,014,415,018.0	89.64%	100%
2	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	26,620,000.0	24,987,000.0	93.87%	100%

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	26,620,000.0	24,987,000.0	93.87%	100%
3	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT sampai dengan GT	105,000.0	0.0	0.00%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	105,000.0	0.0	0.0%	100%
4	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	7,392,400.0	1,890,000.0	25.57%	100%
	Sub Kegiatan :				
	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	7,392,400.0	1,890,000.0	25.57%	100%
5	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4,854,143,275	3,991,914,357	82.2%	92.40%
	Sub Kegiatan :				
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	15,021,400	8,630,000	57.45%	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	4,797,441,475	3,947,699,357	82.29%	92.37%
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	41,680,400	35,585,000	85.38%	92.74%
IV	Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9,841,571,459	7,798,150,451	79.24%	98.01%
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	240,800.0	0	0.0%	0.00%
	Sub Kegiatan :				

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	240,800.0	0	0.0%	0.00%
2	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	8,838,016,400	7,047,674,347	79.74%	99.96%
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	240,800	0	0.0%	0%
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	8,515,056,400	6,766,259,000	79.46%	100%
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	288,406,200	250,865,347	86.98%	100%
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2,280,000	1,720,000	75.44%	100%
5	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,033,000	28,830,000	90.00%	90.89%
3	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1,003,314,259.0	750,476,104.0	74.80%	80.84%
	Sub Kegiatan :				
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	797,989,400.0	596,439,845.0	74.74%	75.91%
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	205,324,859.0	154,036,259.0	75.02%	100%
V	Program : PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,851,255,867	1,415,919,880	76.48%	79.79%
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1,803,954,267.0	1,380,903,280.0	76.55%	79.61%
	Sub Kegiatan :				

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	27,721,200.0	27,717,700.0	99.99%	100%
2	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	1,725,552,067.0	1,303,394,580.0	75.53%	78.68%
3	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	28,496,000.0	28,256,000.0	99.16%	100%
4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	18,345,000.0	18,195,000.0	99.18%	100%
5	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	3,840,000.0	3,340,000.0	86.98%	100%
2	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	47,301,600.0	35,016,600.0	74.03%	86.60%
	Sub Kegiatan :				
1	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	23,403,600.0	14,753,600.0	63.04%	72.91%
2	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	12,625,200.0	10,933,000.0	86.60%	100.00%
3	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	11,272,800.0	9,330,000.0	82.77%	100.00%
VI	Program : Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	671,704,400	658,504,290.5	98.03%	99.98%

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	661,710,400.0	650,459,010.50	98.30%	100%
	Sub Kegiatan :				
1	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	475,193,400.0	465,184,010.50	97.89%	100%
2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	186,517,000.0	185,275,000.0	99.33%	100%
II	kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9,994,000.00	8,045,280	80.50%	98.32%
	Sub Kegiatan :				
1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9,826,400.0	8,045,280.0	81.87%	100%
2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	167,600.0	0.0	0.0%	0.0%
		86,862,381,251.99	78,957,001,221.50	90.90%	98.36%

3.4. Efisiensi penggunaan sumber daya sasaran

Setiap organisasi perlu menerapkan manajemen yaitu sebagai bentuk usaha perencanaan, koordinasi dan juga pengaturan **sumber daya yang ada** agar bisa mencapai tujuan yang **lebih efektif dan efisien**. Penerapan unsur manajemen yaitu **5M** adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal yaitu :

1. **Man (manusia)** merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja
2. **Machines (mesin)** merujuk fasilitas/alat penunjang kegiatan operasional maupun nonoperasional.
3. **Money (Uang/Modal)**,merujuk pada uang sebagai modal/anggaran untuk pembiayaan seluruh kegiatan,
4. **Method (Metode/Prosedur)** merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan cara pelaksanaan kegiatan dan
5. **Materials (Bahan baku)**, merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan ke pemanfaat layanan.

Penerapan efisiensi sumberdaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya sebagai berikut :

Efisiensi Anggaran (Money)

Efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan **memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target**.

Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi :

- a. data capaian Sasaran Strategis;
- b. data pagu anggaran dan data realisasi anggaran.

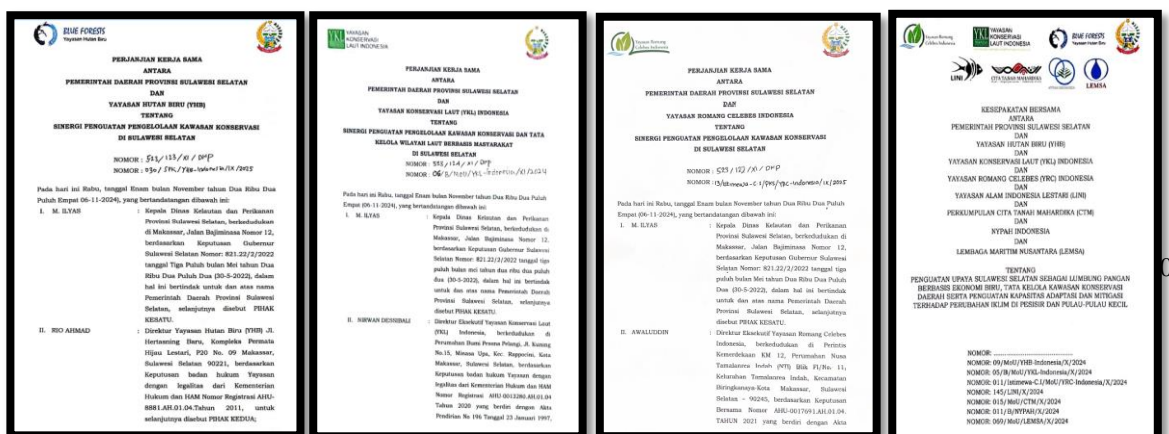
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Perhitungan menggunakan rumus Permenkeu nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 52. Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran

No	Sasaran Strategis	Capaian Rincian Outcome (CRO)	Alaokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 X 3)	(7) = (6 - 5)
I	Sasaran Strategis I : Meningkatnya Produktivitas sektor kelautan dan perikanan	99,87%	33.546.061.634	29.474.281.116,5	33.501.774.699	+ 4.027.493.582
II	Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	98,32%	17.254.512.667	15.215.042.230	16.964.131.844	+1.749.089.614
III	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	98,69%	36.061.806.950	34.267.677.875	35.590.544.701	+ 1.322.866.826
Total			86.862.381.251,99	78.957.001.221,5	86.056.451.243,96	7.099.450.022,46
$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$						= + 8,17

Berdasarkan perhitungan, nilai Efisiensi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar +8,17 % atau efisien. Hal ini menunjukkan bahwa



Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini merupakan salah satu dampak penggunaan *e-commerce* memudahkan instansi pemerintah melakukan pengadaan secara transparan, cepat dan efisien. Selain itu efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pihak terkait untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Dinas kelautan dan perikanan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat

Efisiensi penggunaan sumber daya Machine (Mesin) /penggunaan Teknologi Informasi

Meliputi peralatan, teknologi, dan sarana fisik lainnya yang digunakan dalam proses produksi atau operasional. Penggunaan teknologi untuk mendukung proses operasional yang lancar dilaksanakan pada kegiatan perencanaan dan evaluasi melalui **Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring (SIMPELMO)**. Penggunaan aplikasi ini dilakukan untuk melaksanakan pengukuran Kinerja mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien **membantu produktivitas kerja** yaitu perencanaan, pelaporan monev dilakukan manual menjadi

elektronik, menghemat waktu kerja, mengurangi beban kerja karena pekerjaan berulang, serta mudah dalam penyimpanan. Penggunaan aplikasi layanan dokumen kapal dan dokumen perizinan yang terintegrasi dengan pusat bermanfaat dalam kecepatan pelayanan, efisiensi biaya operasional dan kepastian hukum dalam proses penerbitan dokumen. Pelayanan *E-Sejuta Ikan* melalui website mempermudah dalam permohonan pengujian yang diterapkan oleh UPT BPMPP.



3.5. Penghargaan yang Diterima

- ❖ Piagam Penghargaan **Kategori Provinsi dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terbaik** dalam rangka Penyelenggaraan Penataan ruang Laut tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP



- ❖ Inovasi PACARITA (Pemuda Cinta Bahari Anti Bom Bius Ikan) sebagai *Outstanding Public Services innovations* Kompetisi Inovasi pelayanan Publik Kelompok Umum Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dan adaptasi perubahan Iklim tahun 2025



- ❖ Penghargaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan sebagai **Peringkat Pertama** kategori **Penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tercepat** lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II Periode Semester II Tahun 2024



- ❖ Piagam Penghargaan Sebagai **Badan Publik dengan Kualifikasi Cukup Informatif** dalam Pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025** Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

Secara umum rata-rata nilai capaian sasaran strategis (kinerja organisasi) tahun 2025 adalah kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
SS1	Meningkatnya produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	100,11	Sangat Tinggi
SS II	Meningkatnya kelestarian kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan	98,32	Sangat Tinggi
SS III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	98,69	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Startegis		98,96	Sangat Tinggi

- a. Tujuh Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dengan capaian kataegori sangat tinggu sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
SS I	1.Produksi Perikanan	98,24	Sangat Tinggi
	2.Konsumsi Ikan	100.14	Sangat Tinggi
	3.Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,72	Sangat Tinggi
	4.Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	100,33	Sangat Tinggi
SS II	5.Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	96,63	Sangat Tinggi
	6.Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	1000	Sangat Tinggi
SS III	7.Nilai SAKIP perangkat Daerah	98,69	Sangat Tinggi

- b. Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola anggaran sebesar Rp 91.464.384.438 terealisasi Rp 85.995.489,124,- atau 94,02 % dan realisasi fisik 96,25 %.

4.2. REKOMENDASI

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka rekomendasi perbaikan ke depan :

- a. Perlunya penguatan tata kelola perikanan budidaya, tata kelola perikanan tangkap, tata kelola kawasan konservasi untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- b. Melaksanakan inovasi program unggulan berdasarkan potensi unggulan dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak dan berkelanjutan.
- c. Perlunya pendampingan dan bantuan teknis di lapangan untuk memberikana layanan kepada pelaku usaha, mensosialisasikan terkait transisi kebijakan agar mudah dipahami, dimengerti manfaat dari penerapan kebijakan dan memantau perkembangan dilapangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung pengelolaan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

- d. Pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak (*pentahelix*) untuk menunjang berbagai program prioritas yang telah ditetapkan

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ILYAS
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku Atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 3 November 2025

Pihak Kedua,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Pihak Pertama,



M. ILYAS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan	5.450.079,6 Ton
		2. Nilai Tukar Nelayan	115,3
		3. Nilai Tukar Pembudidayaan	109,83
		4. Konsumsi Ikan	73,50 Kg/Kap/Thn
		5. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Perundangan yang Berlaku	82 %
		6. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	829.561,89 Ha
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88

Program		Anggaran
1	Program Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 36.061.806.950,99,-
2	Program Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 15.403.256.800,00
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 23.032.785.775,00
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 9.841.571.459,00
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.851.255.887,00
6	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 671.704.400,00
Total		Rp. 85.196.250.970,-

Program Prioritas meliputi:

- Pembangunan Apartemen Ikan sebanyak 1.857 Modul/Set dan Pengaman Apartemen Ikan 70 Unit
- Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut
- Pengadaan Kapal Perikanan Kapasitas 5 Gt Lengkap dengan Mesin dan Alat Tangkap sebanyak 20 Unit, Pengawasan dan Perencanaan
- Pengadaan Rumpon sebanyak 130 Unit
- Pengadaan kapal Perikanan Kapasitas 1-3 Gt lengkap dengan Mesin dan Alat Tangkap sebanyak 100 Unit Pengawasan dan Perencanaan
- Pembuatan dan Pemasangan Transplantasi Karang
- Pengadaan Kapal Perikanan Kapasitas 15 Gt lengkap dengan Mesin dan Alat Tangkap 3 Unit, Pengawasan dan Perencanaan
- Pembangunan Turap Penahan Tanah di Pelabuhan Lonrae Kab. Bone
- Penyusunan Dokumen FS Reklamasi Wilayah Pesisir
- Penanaman Mangrove sebanyak 249.233 Batang
- BPJS Ketenagakerjaan Nelayan

TARGET LAINNYA

1	Optimalisasi Serapan Anggaran Tahun 2025
2	Penyelesaian Migrasi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
3	Penyelesaian Migrasi Kredit ASN
4	Pengawasan Proyek Strategis Nasional
5	Pengawasan Program Prioritas

JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK PENERIMAAN		TARGET PENDAPATAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.000.000.000,-
Total		Rp. 2.000.000.000,-

Pihak Kedua,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Makassar, 3 November 2025

Pihak Pertama,



M. ILYAS



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code